

RENCANA STRATEGIS

BALAI POM DI PAYAKUMBUH

TAHUN 2025-2029



Balai POM di Payakumbuh

Jl. Ade Irma Suryani No.18 Labuah Baru, Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
PAYAKUMBUH

NOMOR HK.02.02.12B.12.25.156 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PAYAKUMBUH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Payakumbuh tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI PAYAKUMBUH TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI POM DI PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai POM di Payakumbuh Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Payakumbuh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai POM di Payakumbuh memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Payakumbuh untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Ketiga : Renstra Balai POM di Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai POM di Payakumbuh dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai POM di Payakumbuh.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh

pada tanggal 05 Desember 2025

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI PAYAKUMBUH,



DIO RAMONDRANA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa dengan rahmat dan hidayahnya sehingga rancangan Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Balai POM di Payakumbuh dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) memegang peranan yang sangat penting serta memiliki nilai strategis bagi Kementerian maupun Lembaga (K/L), sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Balai POM di Payakumbuh, sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), memiliki tanggung jawab untuk menyusun rencana strategis yang menjadi penjabaran dari Renstra Badan POM secara keseluruhan.



Dalam proses penyusunan dokumen strategis ini, Balai POM di Payakumbuh berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025–2029 sebagai acuan utama. Selain itu, penyusunan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 mengenai Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga untuk periode tahun 2025–2029. Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang pembangunan nasional (RPJPN 2025–2045) serta rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya dalam sektor kesehatan dan pembangunan manusia, Badan POM berperan aktif dalam memastikan pengawasan yang efektif terhadap produk farmasi dan pangan olahan. Upaya ini bertujuan agar masyarakat memperoleh akses terhadap produk obat dan makanan yang aman, bermutu, serta memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan mendukung proses penyusunan Renstra Balai POM di Payakumbuh Tahun 2025–2029. Melalui kesempatan ini, saya juga mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kemitraan yang harmonis dan kolaboratif dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Sinergi ini diharapkan

tujuan bersama mendukung peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia serta daya saing produk nasional. Semoga penyusunan dokumen Rencana Strategis Balai POM di Payakumbuh Tahun 2025–2029 ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kita semua.

Payakumbuh, 05 Desember 2025

Kepala Balai POM di Payakumbuh



Dio Ramondrana, S.Si., M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.1.1 Capaian Kinerja Renstra Balai POM di Payakumbuh Tahun 2020-2024.....	5
1.1.2 Aspirasi/Ekspektasi Masyarakat.....	33
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	38
1.2.1 Kekuatan (Strength).....	39
1.2.2 Weakness.....	44
1.2.3 Opportunity.....	49
1.2.4 Threat.....	51
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN.....	58
2.1. Visi.....	58
2.2.1 Misi.....	59
2.3 Tujuan.....	61
2.4 Sasaran Kegiatan.....	64
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	78
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....	78
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Payakumbuh.....	81
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	99
4.1 Target Kinerja.....	99
4.2 Kerangka Pendanaan.....	102
BAB V PENUTUP.....	105

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di daerah memiliki peran penting dalam mendukung tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di tingkat nasional, dengan memastikan bahwa produk obat dan makanan yang beredar di wilayahnya aman, berkualitas, dan efektif untuk dikonsumsi masyarakat. Balai POM di Payakumbuh adalah salah satu UPT BPOM yang ada di Sumatera Barat bertanggung jawab atas pengawasan produk di tujuh wilayah kerja yang meliputi kota Payakumbuh, kabupaten 50 Kota, kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, kabupaten Tanah Datar, kabupaten Pasaman, dan kabupaten Pasaman Barat.

Balai POM di Payakumbuh menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks seiring dengan dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan industri di wilayah kerjanya. Dengan kondisi geografis dan karakteristik daerah yang beragam, Balai POM di Payakumbuh harus siap menghadapi tantangan besar dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan sediaan farmasi dan makanan yang beredar di pasar aman, bermutu, dan memenuhi standar yang ditetapkan. Ke depan, BPOM di Payakumbuh akan dihadapkan pada tantangan besar seiring dengan pertumbuhan industri pangan olahan dan semakin banyaknya pelaku usaha UMKM di wilayahnya. Pertumbuhan sektor ini memperbesar risiko beredarnya produk ilegal atau yang tidak memenuhi standar keamanan, baik dari segi kualitas maupun bahan yang digunakan. Ditambah lagi, sebagian besar wilayah kerja BPOM di Payakumbuh merupakan daerah wisata yang memiliki banyak pangan kuliner dan oleh-oleh daerah, yang memerlukan pengawasan lebih ketat terhadap legalitas dan keamanan produk, agar

tidak membahayakan konsumen dan menjaga reputasi kawasan wisata sebagai destinasi pangan yang aman.

Pengembangan Rencana Strategis Balai POM di Payakumbuh untuk periode 2025-2029 merupakan langkah penting dalam merespons tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan sediaan farmasi dan makanan di wilayahnya. Rencana ini tidak hanya bertujuan untuk menghadapi permasalahan yang ada saat ini, tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan di sektor sediaan farmasi dan pangan yang semakin dinamis. Dengan pendekatan yang lebih terencana dan inovatif, Balai POM di Payakumbuh berkomitmen untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan fungsi pengawasannya, mengingat pesatnya perkembangan industri dan pola konsumsi masyarakat. Melalui implementasi strategi yang matang, Balai POM di Payakumbuh siap menghadapi tantangan mendatang dengan keyakinan dan keunggulan, guna memastikan bahwa masyarakat di wilayah Sumatera Barat, khususnya kota Payakumbuh, kabupaten 50 Kota, kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, kabupaten Tanah Datar, kabupaten Pasaman, dan kabupaten Pasaman Barat, selalu mendapatkan akses terhadap produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta melindungi kesehatan publik dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan perubahan terakhir Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai POM di Payakumbuh merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Tugas pokok Balai POM di Payakumbuh adalah melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Payakumbuh menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;

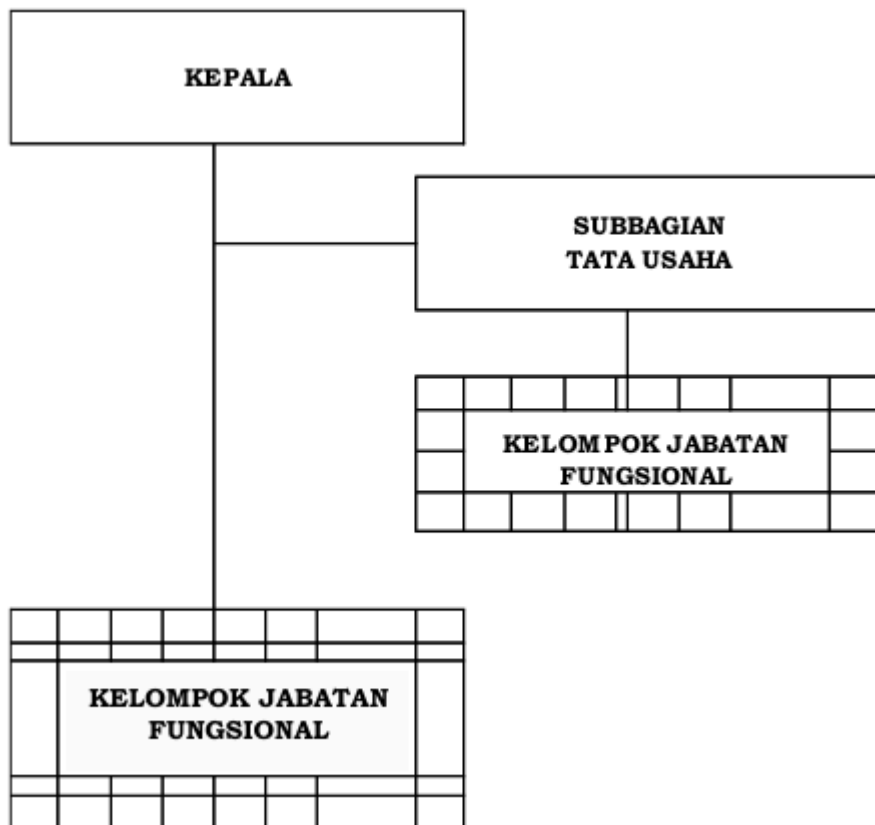
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber.
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Struktur Organisasi Balai POM di Payakumbuh

Struktur organisasi merupakan perangkat yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi. Tujuan penataan organisasi BPOM untuk terciptanya organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan program pembangunan nasional.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Payakumbuh saat ini disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur Organisasi Balai POM di Payakumbuh terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.1 Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai POM di Payakumbuh

- 1) Kepala Balai POM di Payakumbuh yakni sebagai Kepala UPT BPOM menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- 2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.
- 3) Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan

pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- b. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (a) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- c. Tim kerja sebagaimana dimaksud pada poin (b) terdiri atas:
 - ketua tim; dan
 - anggota tim.
- d. Ketua tim sebagaimana dimaksud pada poin (c) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- e. Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.1.1 Capaian Kinerja Renstra Balai POM di Payakumbuh Tahun 2020-2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM.

Pengukuran kinerja Balai POM di Payakumbuh mengacu pada Sasaran Strategis yang disusun berdasarkan visi dan misi Badan POM, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan, peluang, dan sumber daya, serta infrastruktur yang dimiliki oleh Balai POM di Payakumbuh. Penyusunan 11 sasaran kegiatan yang didukung oleh 34 indikator kinerja utama menggunakan pendekatan BSC (*Balance Scorecard*) yang terdiri dari 3 perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective* untuk mendapatkan nilai capaian kinerja Balai POM di Payakumbuh dari perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS).

Sesuai dengan sasaran dan indikator agenda pembangunan, indikator kinerja Balai POM di Payakumbuh yang mengacu RPJMN Badan POM yaitu: (1) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat; dan (2) Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

yang diukur berdasarkan tools pengukuran capaian indikator yang digunakan oleh BPOM.

Tabel 1. 1 Realisasi Indikator RPJMN Terkait BPOM Tahun 2020-2024

Uraian	T/R	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Obat Memenuhi Syarat	T	80,80	83,60	91,50	92,00	88,00
	R	91,07	72,46	72,19	83,02	90,27
	%	112,71	86,67	78,89	90,24	103,00
Persentase Makanan Memenuhi Syarat	T	78,00	80,00	82,00	76,19	86,00
	R	86,11	50,98	70,80	65,00	80,00
	%	110,40	63,73	85,58	77,38	93,00

Di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh, capaian indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi, dengan penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Penurunan ini dipengaruhi oleh tingginya jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap pemeriksaan, seperti obat-obatan yang teridentifikasi ilegal, palsu, rusak, kedaluwarsa, atau dengan label yang tidak sesuai. Fenomena ini terjadi karena metode sampling acak yang diterapkan oleh BPOM, yang memang dirancang untuk menggambarkan kondisi kualitas obat yang beredar di masyarakat secara lebih realistis. Dengan demikian, semakin banyak produk yang diuji secara acak, semakin tinggi probabilitas ditemukan sampel TMS.

Sementara itu, indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat menunjukkan capaian yang lebih baik pada tahun 2020, yang melebihi target yang ditetapkan. Namun, pada periode 2021-2024, capaian ini tidak mencapai target yang diinginkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah meningkatnya jumlah sampel makanan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada parameter uji di laboratorium. Meski demikian, pengambilan sampel yang dilakukan oleh BPOM secara acak ini sebenarnya memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi produk makanan yang beredar di masyarakat, dengan tetap mampu menjaring produk- produk yang tidak memenuhi standar.

Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan pada indikator-indikator

tersebut, metode pengujian acak yang diterapkan oleh BPOM memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kualitas dan keamanan obat serta makanan yang beredar, serta memberikan gambaran yang jelas tentang tingkat kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Tabel 1. 2 Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Payakumbuh Tahun 2020-2024

Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Payakumbuh Tahun 2020-2024															
IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SS1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT															
IKSS 1 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	91,07	112,71	83,6	72,52	86,75	91,5	72,19	78,89	92	83,02	90,24	88	90,27	102,58
IKSS 2 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	86,11	110,40	80	96	120,00	82	70,18	85,58	84	65	77,38	86	80	93,02
IKSS 3 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	64	75,29	87	66,67	76,63	92	60	65,22	93	76,67	82,44	87	86,31	99,21
IKSS 4 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	65	75	115,38	68	87,5	128,68	77	77,78	101,01	78	50	64,10	79,5	81,53	102,55
SS2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT															
IKSS 5 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	85	96,43	113,45	87	100	114,94	98	79,52	81,14	99	100	101,01	100	100	100,00
IKSS 6 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	64,9	50	77,04	70	59,97	85,67	65	59,05	90,84	70	77,59	110,84	78	83,06	106,49
IKSS 7 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	80	96,39	85	100	117,65	87	100	114,94	89	100	112,36	100	100	100,00
IKSS 8 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	63,64	138,34	49	53,33	108,84	68	49,23	72,40	71	53,97	76,01	75	42,25	56,33
IKSS 9 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	40,48	67,46	62	58,66	94,61	63	57,71	91,60	66	74,36	112,67	68	72,9	107,21
IKSS 10 - Indeks Pelayanan Publik													3,55	4,17	117,46
IKSS 11 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	-	77	100	129,87	79	100	120,00	100	100	100,00
IKSS 12 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	94,86	99,85
SS3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh															
IKSS 13 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan													96,3	94,73	98,37
IKSS 14 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman													6	6	100,00
IKSS 15 - Jumlah desa pangan aman													1	1	100,00
IKSS 16 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas													1	1	100,00
SS4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh															
IKSS17. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100,00	50	50	100,00	50	50	100,00	50	50	100,00	50	50,14	100,28
IKSS18. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100,00	50	50	100,00	50	50	100,00	50	50	100,00	50	53,19	106,38

Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Payakumbuh Tahun 2020-2024															
IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SS5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh															
IKSS 19 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	87	43,33	49,80	88		0,00	89	92,5	103,93	90	100	111,11	96	100	104,17
SS6: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan															
Makanan sesuai standar GLP															
IKSS 21 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	-	-	-	-	-	-	2,25	2	88,89	2,5	3	120	3	3	100
SS7: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan															
IKSS 22 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index)													82,59	81,93	99,20
SS8: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan															
bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,9	92,34	107,49
Obat dan Makanan													77,87	75,21	96,59
IKSS 25 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT															
SS9: Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal															
IKSS 26 - Indeks RB Balai Pengawas Obat dan Makanan di Payakumbuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	74,26	99,01
IKSS 27 - Nilai AKIP UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,2	73,44	89,34	74,29	74,31	100,03
IKSS 28 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,54	88,15	123
SS10: Terwujudnya SDM Balai POM di Payakumbuh yang berkinerja optimal															
Makanan di Payakumbuh	100	86,42	86,42	100	85,56	85,56	86,75	85,88	99	87	90,35	103,85	90,53	88,46	97,71
SS11: Terkelolanya Keuangan Balai POM di Payakumbuh secara Akuntabel															
di Payakumbuh	-	-	-	92	75	81,52	90,6	88,42	97,59	91,8	89,83	97,85	87,97	87,63	99,6
IKSS31. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	90	128,57
IKSS32. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	88,8	106,99
IKSS33. Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	75,52	125,87

1. Sasaran Kegiatan (SK1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh

Sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja sebagai berikut (1) Persentase Obat yang memenuhi syarat; (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat; (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; dan (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan. Capaian indikator kinerja pada SS1 tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 1.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1 Tahun 2020-2024

IKSK 1 - Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai persentase jumlah sampel obat acak yang memenuhi syarat terhadap total sampel obat acak yang diperiksa dan diuji. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Sampel acak adalah Sampling yang dilakukan terhadap produk (obat/ makanan) beredar berdasarkan data survei produk beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria tidak memenuhi syarat meliputi tidak memiliki NIE/ produk ilegal termasuk palsu, produk kadaluarsa, produk rusak, tidak memenuhi ketentuan penandaan, dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

IKSK 2 - Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai persentase jumlah sampel Makanan acak yang memenuhi syarat terhadap total sampel makanan acak yang diperiksa dan diuji. Sampel acak adalah Sampling yang dilakukan terhadap Produk Makanan beredar berdasarkan data survei produk beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Kriteria tidak memenuhi syarat meliputi tidak

memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kadaluarsa, produk rusak, tidak memenuhi ketentuan penandaan, dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

IKSK 2 memiliki tren penurunan realisasi dari 86,11% pada tahun 2020, menjadi 80% pada tahun 2024 dengan rata-rata capaian 97,28%. *Trend* jumlah sampel Makanan acak yang diperiksa dan diuji dari tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan yaitu 36 sampel pada tahun 2020 menjadi 85 sampel pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa pengambilan sampel semakin *representative* terhadap jumlah Makanan beredar.

IKSK 3 - Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai persentase jumlah sampel Obat *targeted* yang memenuhi syarat terhadap total sampel obat *targeted* yang diperiksa dan diuji. Obat mencakup obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik. Sampel *targeted* adalah Sampling yang dilakukan terhadap Produk Obat beredar berdasarkan data survei produk beredar berdasarkan kerangka sampling *targeted/purpose* di tahun berjalan. Kriteria tidak memenuhi syarat meliputi tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kadaluarsa, produk rusak, tidak memenuhi ketentuan penandaan, dan tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

IKSK 3 memiliki tren peningkatan realisasi dari 64 pada tahun 2020 menjadi 86,31 pada tahun 2024, dengan rata-rata capaian 79,76%. *Trend* jumlah sampel Obat *targeted* yang diperiksa dan diuji dari tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan yaitu 26 sampel pada tahun 2020 menjadi 95 sampel pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa pengambilan sampel semakin *representative* terhadap jumlah Obat beredar. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik.

IKSK 4 - Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator kinerja ini didefinisikan sebagai persentase jumlah sampel Makanan *targeted* yang memenuhi syarat terhadap total sampel Makanan *targeted* yang diperiksa dan diuji. Sampel *targeted* adalah Sampling yang dilakukan terhadap Produk Makanan beredar berdasarkan data survei produk beredar berdasarkan kerangka sampling *targeted/purpose* di tahun berjalan. Kriteria

Makanan tidak memenuhi syarat adalah jika pangan atau kemasan pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

IKSK 4 memiliki tren penurunan realisasi dari 75% pada tahun 2020, menjadi 81,53% pada tahun 2024 dengan rata-rata capaian 102,34%. *Trend* jumlah sampel Makanan *targeted* yang diperiksa dan diuji dari tahun 2020 hingga 2024 terus mengalami peningkatan yaitu 12 sampel pada tahun 2020 menjadi 65 sampel pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa pengambilan sampel semakin *representative* terhadap jumlah Makanan beredar.

2. Sasaran Kegiatan(SK2)

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja sebagai berikut (1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan; (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan; (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu; dan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; (5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan; (6) Indeks Pelayanan Publik; (7) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik; dan (8) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota. Capaian indikator kinerja pada SK2 tahun 2020- 2024 sebagai berikut:



Gambar 1.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 2 Tahun 2020-2024

IKSK 5 - Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Indikator kinerja ini mencakup keputusan/ rekomendasi yang dilaksanakan yang terdiri dari 4 komponen yaitu:

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Payakumbuh yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai POM di Payakumbuh
- Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/

dilaksanakan oleh Balai POM di Payakumbuh

- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Payakumbuh yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat dan UPT lain
- d. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Balai POM di Payakumbuh

IKSK 5 memiliki tren peningkatan realisasi dari 96,43% pada tahun 2020, menjadi 100% pada tahun 2024 dengan rata-rata capaian 102,11%.

IKSK 6 - Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Indikator kinerja ini mencakup rekomendasi hasil inspeksi yang dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan izin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan, hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Rekomendasi tersebut diberikan BPOM kepada stakeholder yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan yaitu pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/ lembaga, organisasi profesi maupun institusi lain yang terkait pengawasan obat dan makanan) untuk ditindak lanjuti.

IKSK 6 memiliki tren peningkatan realisasi dari 50% pada tahun 2020, menjadi 83,06% pada tahun 2024 dengan rata-rata capaian 94,18%.

IKSK 7 - Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan Jumlah Keputusan Penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah permohonan penilaian sertifikasi dikali seratus persen, dimana Jumlah Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik meliputi: Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT, Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik.

Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang, Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin

Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Kecil, Hasil pemeriksaan audit surveillance sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dan sertifikat komitmen SMKPO di sarana peredaran, Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB, Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik, Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan.

IKSK 7 memiliki tren peningkatan realisasi dari 96,39 % pada tahun 2020 menjadi 100% pada tahun 2024 dengan rata-rata capaian 108,27 %.

IKSK 8 - Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa (inspeksi sarana rutin dan inspeksi sarana karena hasil tindak lanjut). Sarana produksi yang diawasi oleh Balai POM di Payakumbuh meliputi sarana produksi: Industri Pangan Olahan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), dan Kosmetik Golongan B.

IKSK 8 memiliki tren penurunan realisasi dari 63,64% pada tahun 2020, menjadi 42,25% pada tahun 2024 dengan rata-rata capaian 90,38%.

IKSK 9 - Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa.

IKSK 9 memiliki tren peningkatan realisasi dari 40,48% pada tahun 2020, menjadi 72,9% pada tahun 2024 dengan rata-rata capaian 94,71%.

IKSK-10 Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Untuk peningkatan kapasitas seluruh unit pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM, telah dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, menggunakan 6 (enam) aspek yang menjadi komponen penilaian yaitu: (1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%); (2) Profesionalisme SDM (25%); (3) Sarana Prasarana (18%); (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%); (5) Konsultasi dan Pengaduan (10%); dan (6) Inovasi (12%).

Tahun 2020 Balai POM di Payakumbuh masih berstatus Loka Pengawas Obat dan Makanan dan belum melakukan penilaian terhadap Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan. IKSK 10 baru dilakukan penilaian pada tahun 2024 dengan realisasi 4,17 (Sangat Baik) dan capaian rata-rata 111,2%. Kontribusi terbesar realisasi berasal dari komponen “Profesionalisme SDM” yang menunjukkan Balai POM Payakumbuh telah memiliki SDM dengan Kompetensi Pelayanan Publik yang baik. Kontribusi terendah berasal dari Komponen “Inovasi” yang menunjukkan bahwa Balai POM di Payakumbuh belum mengembangkan inovasi yang dimiliki secara maksimal. Upaya peningkatan inovasi dilakukan oleh Balai POM di Payakumbuh dengan menyusun dan menetapkan regulasi terkait inovasi; menyiapkan kompetensi SDM yang terlibat; menyusun program pelaksanaan inovasi; mengalokasikan anggaran; serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi.

IKSK 11 - Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik

Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan Ruang Lingkup UMKM:

UMKM pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil, UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: (a) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan (b) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya, UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan-A, industri kosmetik golongan-B, dan badan usaha pemohon notifikasi.

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- 1) UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap hygiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh UPT BPOM dan/atau terbit izin

penerapan CPPOB

- 2) UMKM Obat Tradisional yang didampingi yaitu : UMKM yang memproduksi Obat Tradisional, UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar, (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap, UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up), UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap, UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- 3) UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi), Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Kriteria UMKM: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan, Untuk UMKM OT mengacu pada Permenkes 26 Tahun 2018, .Untuk UMKM Kosmetik: Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); Industri kosmetik yang belum memiliki e- sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

IKSK 11 memiliki tren penurunan realisasi dari 129, 8 pada tahun 2022, menjadi 100 pada tahun 2024 dengan rata-rata capaian 116,6 %.

IKSK 12 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang ada pada tahun 2024, dimana aspek dalam indikator kinerja ini ada 3 (tiga) yaitu: Aspek TKPPOM (Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan), Aspek TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) dan Aspek DAK (Dana Alokasi Khusus). Aspek TKPPOM dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh.

3. Sasaran Kegiatan (SK3)

Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan 3 indikator kinerja sebagai berikut : (1) Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, (2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), (3) Jumlah desa pangan aman, (4) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas. Capaian Indikator Kinerja SK3 untuk Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dari tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :



Gambar 1.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 3 Tahun 2020-2024

IKSK-13 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

Untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, Balai POM di Payakumbuh telah melaksanakan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran maupun secara tidak langsung melalui media sosial, radio, media cetak, media luar ruang, atau media lainnya. Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan oleh Balai POM di Payakumbuh sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran efektivitas KIE Obat dan Makanan

Pada tahun 2020 Balai POM di Payakumbuh yang masih berstatus Loka Pengawas Obat dan Makanan belum melakukan pengukuran terhadap Survei Efektifitas KIE. IKS 13 baru dilakukan pengukuran di tahun 2021 memiliki tren peningkatan realisasi 92,98 dengan rata-rata capaian 99,98 % menjadi 94,73 pada tahun 2024. Kontribusi terbesar peningkatan indeks berasal dari komponen “Pemahaman” yang menunjukkan persepsi masyarakat dapat memahami konten atau materi KIE BPOM, namun terdapat penurunan capaian terhadap target yaitu 98,25 %. Kontribusi terendah berasal dari komponen

“Minat” yang menunjukkan persepsi minat masyarakat dalam mengikuti kegiatan KIE BPOM. Upaya peningkatan minat masyarakat terhadap KIE BPOM dilakukan dengan pengembangan inovasi materi KIE dan metode penyampaian KIE sesuai dengan tren kebutuhan informasi per segmen target audiens.

IKSK-14 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Aksi Nasional Gerakan menuju Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Bermutu dan Bergizi (Aksi Nasional PJAS) telah dicanangkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada Tanggal 31 Januari 2011 sebagai Gerakan untuk meningkatkan PJAS yang aman, bermutu dan bergizi melalui peran serta aktif yang lebih terpadu dari seluruh kementerian, Lembaga pemerintah dan lintas sektor di pusat maupun daerah serta pemberdayaan komunitas sekolah. Sekolah, termasuk guru dan orang tua murid harus ikut berperan dalam mengawasi keamanan jajanan anak di lingkungan sekolah masing-masing. Target Indikator Kinerja Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman adalah jumlah Lembaga yang akan mendapatkan full intervensi sejak tahap awal hingga dilakukannya sertifikasi terhadap sekolah tersebut sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM.

IKSK-14 belum dilaksanakan pada tahun 2020-2023 dan baru dilaksanakan tahun 2024. Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh tahun 2024 adalah 6 Sekolah dengan capaian 100 %.

IKSK-15 Jumlah Desa Pangan Aman

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pembangunan keamanan pangan dimulai dari tingkat individu, keluarga hingga masyarakat. Untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan keamanan pangan, BPOM menginisiasi Program Gerakan Keamanan Pangan Desa pada tahun 2014. Program ini direvitalisasi menjadi desa dan kelurahan pangan aman pada tahun 2022 sejak terbitnya Peraturan Badan POM nomor 4 tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman. Program ini dilakukan untuk memberikan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat.

Pada tahun 2020-2023 Balai POM di Payakumbuh belum melaksanakan IKSK-15, dan baru dilaksanakan pada tahun 2024. Pada tahun 2024 IKSK 15 dilaksanakan dengan realisasi 1 Desa/Kelurahan Pangan Aman dengan Capaian 100 %.

IKSK-16 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Sebagai pusat perekonomian masyarakat, pasar rakyat harus menerapkan keamanan pangan dalam setiap aktivitasnya dengan melibatkan seluruh komunitas pasar pangan aman dari bahan berbahaya. Kepala badan POM telah mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan di Sarana Peredaran, untuk itu pelaku usaha (pedagang pasar) dihimbau untuk selalu mematuhi regulasi, menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik. Target Indikator Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah jumlah Lembaga yang akan mendapatkan full intervensi sejak tahap awal hingga dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM. Pada Tahun 2024, Balai POM di Payakumbuh mendapatkan target Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sebanyak 1 (satu) Lembaga dengan lokus intervensi yaitu Kota Bukittinggi.

IKSK-16 baru dilaksanakan tahun 2024. Realisasi Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh pada tahun 2024 adalah 1 Pasar dengan capaian 100 %.

4. Sasaran Kegiatan(SK4)

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja sebagai berikut (1) Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan (2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Capaian indikator kinerja pada SK4 tahun 2020- 2024 sebagai berikut:



**Gambar 1.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 4 Tahun
2020-2024**

IKSK 17 - Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Dikarenakan Balai POM di Payakumbuh belum melakukan pengujian sehingga perhitungan hanya pada sampel obat yang diperiksa. Pengujian baru akan dilakukan untuk komoditi obat meliputi pengujian *rapid test*.

IKSK 17 memiliki tren peningkatan realisasi dari 50% pada tahun 2020, menjadi 50,14% pada tahun 2024 dengan rata-rata capaian 100,28%. Pada tahun 2024 terdapat penambahan 1 (satu) sampel UMKM obat tradisional, sehingga terdapat kelebihan realisasi dibandingkan dengan target

IKSK 18 - Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sampel makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga *timeline* yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium. Untuk Balai POM di Payakumbuh yang belum melakukan pengujian, maka untuk indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya dilakukan perhitungan capaian terhadap sampel yang diperiksa.

IKSK 18 memiliki tren peningkatan realisasi dari 50% pada tahun 2020,

menjadi 53,19% pada tahun 2024 dengan rata-rata capaian 106,38%. Pada tahun 2024 terdapat penambahan 9 (sembilan) sampel pangan kasus (Latiao dan Pangan Fortifikasi), sehingga terdapat kelebihan realisasi dibandingkan dengan target.

5. Sasaran Kegiatan(SK5)

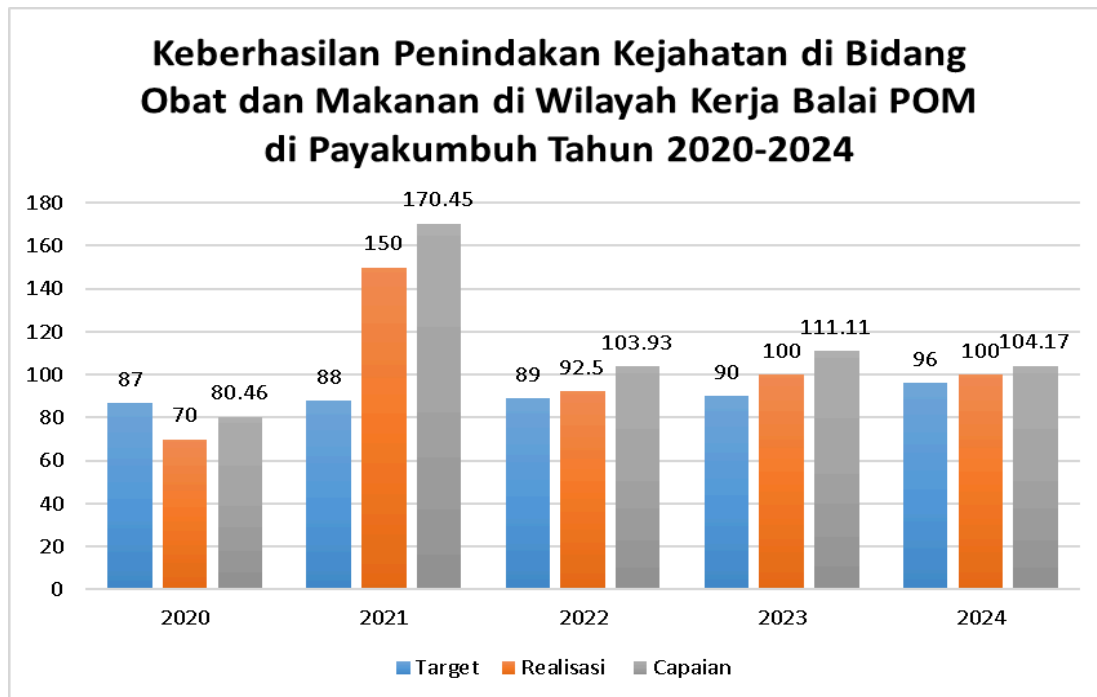
Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penyidikan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Payakumbuh dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh. Dalam mendukung keberhasilan proses penyidikan dan penyelesaian berkas perkara, diperlukan juga Koordinasi dengan *Criminal Justice System*. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja berupa Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh.

IKSK 19 - Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh

Perkara di Bidang Obat dan Makanan merupakan peristiwa atau kejadian dalam masyarakat yang akibatnya dapat menimbulkan akibat hukum pidana bagi siapa yang melanggar peraturan ataupun ketentuan pidana Obat dan Makanan yang telah ditetapkan. Dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui dengan pembobotan tersendiri. Capaian Sasaran Kegiatan ini dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut: SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%, Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 40% persen, P21(Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30% dan Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15 %. Tahapan yang menjadi acuan perhitungan dalam indikator ini adalah tahap II yang merupakan proses penyerahan barang bukti dan tersangka dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) ke Kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).



Gambar 1.6 Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh Tahun 2020-2024.

Berdasarkan data Keberhasilan Penindakan di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh Tahun 2020-2024, terjadi kenaikan dari tahun ke tahun terutama pada tahun 2024 dimana terjadi peningkatan target yang cukup signifikan, yang awalnya berturut-turut dari 2020-2023 sebesar masing-masing 87, 88, 89 dan 90% menjadi 96% pada tahun 2024. Pada Tahun 2020-2023, target perkara Balai POM Payakumbuh adalah 2 (dua) perkara per tahun, namun pada tahun 2020 target perkara diturunkan menjadi 1 perkara terkait *Automatic Adjustment*. Untuk tahun 2024, target perkara Balai POM di Payakumbuh meningkat menjadi 3 (tiga) perkara per tahun namun target ini berubah menjadi 4 (empat) perkara karena terdapat 1 (satu) perkara yang harus ditindaklanjuti dengan Pro Justitia sehingga menyebabkan perubahan target perkara tahun 2024. Rata-rata Realisasi IKU yang diperoleh pada rentang Renstra 2020- 2024 yaitu sebesar 102.5% dengan rata-rata Capaian sebesar 114.02% sehingga dapat dikategorikan sebagai Sangat Baik. Meskipun secara keseluruhan sudah mencapai target, namun terdapat realisasi IKU yang tidak mencapai target

yaitu pada tahun 2020 yaitu dengan realisasi 70% dan persentase capaian sebesar 80.46%. Hal ini disebabkan oleh target operasi yang baru bisa dieksekusi pada Triwulan akhir sehingga menyebabkan perkara menjadi *Carry Over*. Pada tahun 2021, terdapat lonjakan pada realisasi IKU yaitu sebesar 150% dengan persentase capaian sebesar 170.45%. Hal ini disebabkan oleh adanya perkara *Carry Over* dari tahun sebelumnya sehingga berpengaruh terhadap persentase keberhasilan penindakan secara keseluruhan. Metode perhitungan persentase keberhasilan penindakan pada tahun 2021 juga belum menyesuaikan target terhadap realisasi sehingga persentase keberhasilan penindakan bisa melebihi 100%. Terhitung sejak tahun 2022, perhitungan persentase keberhasilan penindakan sudah disesuaikan dengan target dengan nilai maksimal 100%, berapapun realisasi target yang didapat. Pada tahun 2022 realisasi IKU sebesar 92.5% disebabkan perkara ke-2 baru didapat dan dieksekusi pada bulan Oktober tahun 2022 sehingga terjadi *Carry Over* namun nilai realisasi IKU ini masih melebihi target tahun 2022 sebesar 89%. Untuk tahun 2023 dan 2024, realisasi IKU mencapai nilai maksimal yaitu 100% dengan persentase capaian sebesar 111.11% pada tahun 2023 dan 104.17 pada tahun 2024 dengan kategori Sangat Baik. Pada tahun 2023 juga merupakan tahun perdana bagi Balai POM di Payakumbuh melakukan penyidikan secara mandiri oleh PPNS dari Balai POM di Payakumbuh sampai sekarang.

Faktor pendukung tercapainya Persentase Keberhasilan Penindakan di Bidang Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Payakumbuh Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan operasi penindakan dan penyidikan dilakukan dengan seksama dan terstruktur sehingga proses penyidikan dapat terselesaikan tepat waktu di tahun berjalan.
- b. Koordinasi Lintas Sektor terutama dengan Aparat Penegak Hukum (Criminal Justice System) sudah terjalin dengan baik sehingga proses penyidikan dan pemberkasan dapat dilaksanakan dengan lancar.
- c. Terjalannya kerja sama yang solid antar personil di Balai POM di Payakumbuh terutama Fungsi Penindakan, Fungsi Pemeriksaan dan Fungsi Infokom sehingga memperlancar dalam operasi penindakan dan penyidikan.

6. Sasaran Kegiatan (SK6)

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Untuk mengukur keberhasilan dari Sasaran Kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

- 1) Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target sebesar 40% pada akhir tahun 2024
- 2) Indeks pengelolaan data dan informasi di Balai POM di Payakumbuh yang optimal dengan target sebesar 3 tahun 2024

IKSK 20 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

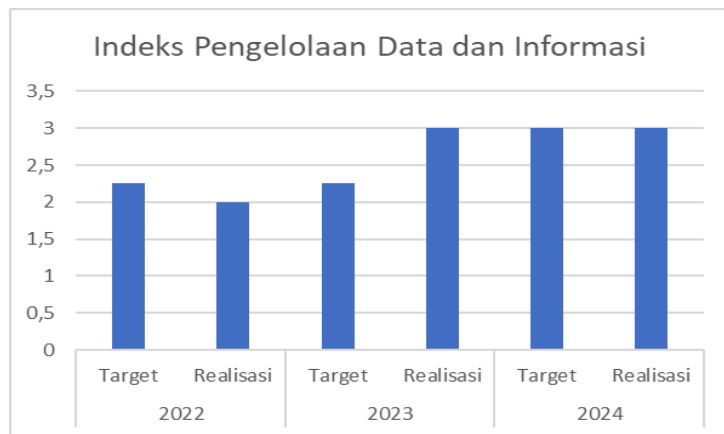
Pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN).

Sebagai Balai baru IKSK ini baru dilaksanakan pada tahun 2024 dengan target pemenuhan standar 40% dan sesuai dengan hasil penilaian yang dilakukan oleh PPPOMN nilai pemenuhan GLP BPOM di Payakumbuh sebesar 41,76%. Berdasarkan hasil tersebut capaian pemenuhan standar GLP adalah 104,4 %.

IKSK 21 - Indeks Pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Realisasi indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal pada tahun 2024 sudah mencapai kategori Baik. Beberapa hal yang mempengaruhi capaian nilai indeks pengelolaan data dan informasi UPT adalah penggunaan email corporate secara aktif oleh seluruh pegawai Balai POM di Payakumbuh dan dashboard BCC.

IKSK 21 memiliki tren peningkatan realisasi dari 2 pada tahun 2022 menjadi 3 pada tahun 2023 dan tahun 2024. Hal ini menunjukkan pengelolaan data dan informasi pada Balai POM di Payakumbuh sudah baik.



Gambar 1.7 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi

7. Sasaran Kegiatan (SK7)

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan 1 Indikator Kinerja sebagai berikut: (1) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dengan nilai pada tahun 2024 81,93 dengan target 82,59 dan capaian 99,20%. Kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus dilaksanakan, karena Obat dan Makanan yang diedarkan masih berpotensi tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus mengetahui bagaimana cara memilih dan menggunakan produk untuk dikonsumsi agar aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Balai POM di Payakumbuh melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan informasi dan Edukasi (KIE) sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.

IKSK-22 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan pengawasan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bermitra dengan pemangku kepentingan lainnya. Keberhasilan program-program yang dilakukan oleh BPOM diukur dari dampaknya terhadap masyarakat, salah satunya dari kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Kesadaran masyarakat ditunjukkan melalui pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan

dalam melindungi diri sendiri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran indeks kesadaran masyarakat untuk mengukur keberhasilan program dan capaian target kinerja BPOM secara sistematis dan *scientific based*.

Balai POM di Payakumbuh sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM juga telah melakukan berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan kemitraan di wilayah kerjanya. Dampak dari program KIE yang telah dilaksanakan terhadap kesadaran masyarakat dapat dilihat melalui hasil pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) ke-7 **“Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan”**. Sebagai salah satu balai baru, indeks kesadaran terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan Balai POM di Payakumbuh baru dilakukan pada tahun 2024 dengan hasil pengukuran indeks adalah 81,93 dan persentase capaian terhadap target yaitu sebesar 99,20 %. Hasil pengukuran indeks ini diharapkan semakin meningkat untuk kedepannya terutama selama periode 2025-2029.

8. Sasaran Kegiatan (SK8)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan 3 Indikator Kinerja sebagai berikut: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM. Capaian indikator kinerja pada SK3 tahun 2020-triwulan III 2024 sebagai berikut:

IKSK-23 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Bimbingan dan pembinaan yang dimaksud dalam indikator ini adalah bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap regulasi (*regulatory assistance*). Pengukuran indeks dilakukan melalui survei dengan mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam 4 kategori jenis kegiatan berupa Pendampingan, Desk, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir,

eksportir dan sarana pelayanan kefarmasian.

IKSK 23 ini belum dilaksanakan pada tahun 2020-2023, IKS 23 ini baru dilaksanakan pada tahun 2024. Target Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 yaitu 85,9 Realisasi IKS 23 adalah 92,34. Dapat disimpulkan bahwa selama 1 tahun terakhir pendampingan, desk, bimbingan teknis, dan sosialisasi terkait pengawasan Obat dan Makanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha memberikan kepuasan yang sangat baik bagi pelaku usaha.

IKSK-24 Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep service quality yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan, dengan 4 (empat) dimensi kepuasan masyarakat, yaitu Reliability, Assurance, Responsiveness dan Empathy. Kepuasan masyarakat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan

IKSK 24 belum merupakan target Balai POM di Payakumbuh pada tahun 2020-2023, IKS 24 baru ditargetkan pada tahun 2024. Target IKS 24 pada tahun 2024 adalah 77,87 dengan capaian Balai POM Payakumbuh 75,21 dengan capaian 96,59%. Dari tahun 2020-2023 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan baik per komoditi maupun secara nasional terus meningkat meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2021 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan ekspektasi masyarakat yang meningkat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan. Namun demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa selama tahun empat tahun terakhir kinerja pengawasan Obat dan Makanan baik *pre-market* maupun *post-market* berhasil dengan “Baik” meski menghadapi berbagai dinamika dalam pelaksanaannya.

Kedepannya untuk peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM Payakumbuh akan meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan secara umum, terutama pemberian informasi kepada masyarakat, peningkatan frekuensi pengawasan dan penindakan di area rural dan perbatasan melalui pengawasan berbasis komunitas dan meningkatkan penindakan produk ilegal di pasar offline dan online serta

meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media.

IKSK 25 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik (pelaku usaha) yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. IKS 25 belum merupakan target dari Balai POM di Payakumbuh pada tahun 2020- 2023, namun Balai POM di Payakumbuh tetap melakukan survei kepuasan masyarakat dan mengolah hasilnya untuk mendapatkan hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik UPT Balai POM di Payakumbuh. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik memiliki tren peningkatan dari 84,01 pada tahun 2020 menjadi 91,05 pada tahun 2024. Terdapat konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Balai POM di Payakumbuh selama 4 (empat) tahun terakhir. Hal ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh unsur pelayanan secara optimal dan efektif dari seluruh unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM. Untuk kedepannya Balai POM di Payakumbuh akan meningkatkan setiap unsur dari pelayanan publik yaitu publikasi persyaratan, peningkatan kompetensi petugas, dan peningkatan sarana dan prasarana.

9. Sasaran Kegiatan (SK9)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut :

IKSK 26 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Pada rancangan awal Renstra 2020-2024, indikator kinerja utama yang mengukur keberhasilan Sasaran Kegiatan ini adalah persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT. Persentase implementasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota

Payakumbuh pada tahun 2020-2023 dengan target indikator kinerja adalah 100% dengan realisasi adalah sebesar 100%, sehingga persentase capaian pada tahun 2020-2023 adalah 100% dengan kriteria baik.

Reformasi Birokrasi (RB) di Balai POM Payakumbuh dimulai pada 2024 setelah status UPT berubah menjadi balai pada Oktober 2023. Fokus utama adalah membangun Zona Integritas (ZI) untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik KKN serta meningkatkan pelayanan publik. Hasil evaluasi di 2024 menunjukkan nilai 74,26, sedikit di bawah target 75, namun komitmen untuk terus memperbaiki tetap ada. Langkah-langkah yang diambil termasuk meningkatkan pelayanan, melakukan evaluasi rutin, melatih SDM, dan menerapkan sistem teknologi informasi yang lebih transparan dan efisien.

IKSK 27 - Nilai AKIP BPOM

Penguatan akuntabilitas kinerja adalah salah satu program penting dalam reformasi birokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk memastikan implementasi yang efektif dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN RB melakukan evaluasi guna mendorong perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Pada periode 2020 hingga 2024, IKS 27 mencatatkan nilai AKIP sebagai berikut: 82,2 pada 2020, 73,44 pada 2021, 89,34 pada 2022, 74,29 pada 2023, dan 74,31 pada 2024. Meskipun terjadi fluktuasi, dengan nilai tertinggi pada 2022, capaian tahun 2024 yang berada di angka 74,31 menunjukkan adanya peningkatan yang relatif kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai ini masih lebih rendah dibandingkan dengan UPT lainnya, yang menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk memperbaiki implementasi SAKIP di instansi ini. Evaluasi lebih mendalam dan langkah-langkah perbaikan yang tepat sangat diperlukan agar IKS 27 dapat meningkatkan kinerja dan mencapai standar yang lebih tinggi.

IKSK 28 - Nilai Pengelolaan Kearsipan

Pengelolaan arsip yang baik sangat penting agar arsip dapat memberikan manfaat yang maksimal, tidak hanya dalam konteks pengambilan keputusan, tetapi juga dalam hal efisiensi operasional dan peningkatan akuntabilitas organisasi. Dengan pengelolaan arsip yang tepat, organisasi dapat memastikan

bahwa informasi yang relevan dapat diakses kembali dengan mudah dan tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

IKSK 28 merupakan IKS baru yang mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal dengan perolehan realisasi 88,15 dari target 71,54 dengan nilai capaian lebih dari 120 % (Sangat Baik)

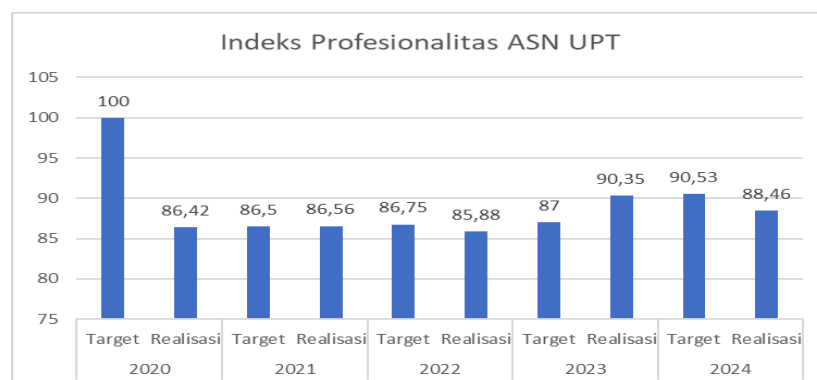
10. Sasaran Kegiatan (SK10)

Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal

Untuk mengukur capaian Sasaran Kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Payakumbuh, dengan target 90,53 pada akhir tahun 2024.

IKSK 29 - Indeks Profesionalitas ASN BPOM

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pengukuran IP ASN menggunakan 4 Dimensi, yaitu: **Dimensi Kualifikasi, Kinerja, Kompetensi, dan Disiplin.**



Gambar 1.8 Indeks Profesionalitas ASN UPT

IKSK 29 memiliki tren peningkatan realisasi dari 86,42 pada tahun 2020 menjadi 88,46 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir kualitas ASN Balai POM di Payakumbuh masuk dalam kategori baik berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam

melaksanakan tugas jabatan

11. Sasaran Kegiatan (SK10)

Terkelolanya Keuangan Balai POM di Payakumbuh secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga Sasaran Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan Balai POM di Payakumbuh dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Pada awal periode renstra 2020-2024, dimana UPT di Payakumbuh masih berstatus Loka, Indikator yang menjadi capaian Sasaran Kegiatan ini hanya pada 1 IKU yaitu Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT. Keberhasilan Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Payakumbuh dengan target indikator kinerja pada tahun 2020 adalah 92% dengan realisasi sebesar 75%, sehingga persentase capaian pada tahun 2020 adalah 81,52% dengan kriteria cukup.

Untuk periode tahun selanjutnya Sasaran Kegiatan ini diukur melalui beberapa indikator kinerja antara lain sebagai berikut:

IKSK-30 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Payakumbuh

Nilai kinerja anggaran (NKA) merupakan hasil penilaian Kementerian Keuangan terhadap kinerja anggaran Satuan Kerja Balai POM di Payakumbuh yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). IKPA dimonitor melalui Aplikasi OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sedangkan EKA dimonitor melalui Aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.

IKSK 30 memiliki tren kenaikan realisasi dari 75 pada tahun 2021 menjadi 89,83 pada tahun 2023, dengan rata-rata capaian pada kategori Cukup. Untuk Realisasi IKSK 29 tahun 2024 akan diperoleh di awal tahun 2025.

IKSK-31 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan. IKSK 31 merupakan indikator kinerja baru yang mendukung terwujudnya Pengelolaan Keuangan Balai POM di Payakumbuh secara Akuntabel dengan perolehan realisasi 90 dari target 70 dengan nilai capaian lebih dari 120% (Sangat Baik)

IKSK-32 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan. Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

IKSK 32 merupakan indikator kinerja baru yang mendukung terwujudnya Pengelolaan Keuangan Balai POM di Payakumbuh secara Akuntabel dengan perolehan realisasi 90 dari target 70 dengan nilai capaian lebih dari 120 % (Sangat Baik).

IKSK-33 Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan: Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada dan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

IKSK 33 merupakan indikator kinerja baru yang mendukung terwujudnya Pengelolaan Keuangan Balai POM di Payakumbuh secara Akuntabel dengan perolehan realisasi 90 dari target 70 dengan nilai capaian lebih dari 120 % (Sangat Baik)

1.1.2 Aspirasi/Ekspektasi Masyarakat

Aspirasi stakeholder terhadap Balai POM di Payakumbuh menunjukkan harapan yang besar terhadap peran strategis lembaga ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Salah satu wujud dukungan yang nyata datang dari Pemerintah Kota Payakumbuh adalah dengan memberikan hibah tanah untuk pembangunan sarana perkantoran dan gedung laboratorium Balai POM di Payakumbuh seluas 4.940 m². Ini mencerminkan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan fasilitas yang dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja Balai POM.

Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan Balai POM Payakumbuh

dapat memiliki sarana prasarana yang lebih memadai, yang akan memperkuat kemampuan lembaga ini dalam menjalankan tugas pengawasan, pengujian, dan pelayanan kepada masyarakat. Keberadaan Balai POM di Payakumbuh juga diharapkan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, meningkatkan efektivitas layanan, dan mendorong terciptanya daerah yang lebih sehat, aman, dan bebas dari peredaran produk obat dan makanan yang berbahaya. Melalui dukungan ini, stakeholder berharap Balai POM di Payakumbuh dapat terus berkembang, memberikan manfaat lebih besar, serta berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih baik.

a. Aspirasi Stakeholder pada Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Balai POM di Payakumbuh

Sebagai bentuk komitmen dalam penerapan prinsip keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan, Balai POM di Payakumbuh secara rutin menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) setiap tahun. Kegiatan ini menjadi sarana bagi Balai POM untuk menghimpun masukan, aspirasi, dan umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat perumusan kebijakan serta penyempurnaan pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan.

Pada Tahun 2025, Balai POM di Payakumbuh telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik yang diikuti oleh peserta dari lima unsur, yaitu pengguna layanan, akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat, dan media. Berdasarkan hasil pelaksanaan FKP Tahun 2025 tersebut, teridentifikasi beberapa isu penting yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut dalam perencanaan strategis Balai POM di Payakumbuh, antara lain:

1. Identifikasi Masalah

- a) Belum tersedianya SK Tim TKPPOM sebagai wadah koordinasi antar lintas sektor terutama dalam hal peningkatan pelayanan publik.
- b) Kolaborasi antara pemerintah bersama organisasi profesi dan akademisi dalam bidang obat dan makanan masih perlu dioptimalkan lagi sehingga peran serta organisasi profesi dan akademisi dapat ditingkatkan.
- c) Belum adanya surat tembusan dari hasil pengawasan Balai POM di Payakumbuh kepada organisasi profesi khususnya PAFI dan IAI.
- d) Pelaku usaha terkendala dalam melaksanakan tahap-tahap perizinan, terutama kesulitan memenuhi data tambahan dari evaluator sehingga

menyebabkan timeline menjadi lebih lama dari seharusnya.

2. Analisis

Untuk menjawab berbagai permasalahan yang disampaikan pada Forum Konsultasi Publik tersebut, Balai POM di Payakumbuh perlu:

- a) Agar dapat dibentuk SK Tim TKPPOM untuk koordinasi yang baik antar lintas sektor dalam melakukan pengawasan dan pendampingan pelaku usaha obat dan makanan
- b) Agar kolaborasi dari Balai POM di Payakumbuh, lintas sektor terkait, organisasi masyarakat dan akademisi ditingkatkan khususnya kegiatan-kegiatan pengawasan obat dan makanan baik itu edukasi, asistensi regulasi, dan kegiatan lainnya oleh Balai POM di Payakumbuh dapat melibatkan organisasi profesi dan akademisi, sehingga peran serta organisasi dan akademisi dapat dimaksimalkan
- c) Agar hasil pengawasan oleh Balai POM di Payakumbuh surat tembusan kepada organisasi profesi khususnya PAFI dan IAI
- d) Agar ada pendampingan dari Balai POM di Payakumbuh terkait pemenuhan data tambahan, sehingga timelinenya tidak bertambah lama

3. Rencana Aksi

- a) Akan dilakukan koordinasi dengan lintas sektor dan kepala daerah dalam rangka peningkatan dan pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan obat dan makanan.
- b) Peningkatan kolaborasi dan dengan pentahelix dalam rangka kegiatan edukasi, asistensi regulasi, dan kegiatan Balai POM Payakumbuh.
- c) Peningkatan koordinasi dengan organisasi profesi dalam rangka pembinaan dan meningkatkan kepatuhan kepada anggota organisasi profesi.
- d) Optimalisasi program pendampingan kepada pelaku usaha dalam rangka pendaftaran produk Obat dan Makanan terutama melalui Inovasi dalam rangka pendampingan UMKM.

b. Survei Kepuasan Masyarakat

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Balai POM di Payakumbuh secara konsisten melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun. Kegiatan ini dilaksanakan secara mandiri oleh Balai POM di Payakumbuh dengan koordinasi dari Tim Kerja Pengembangan

Pelayanan Publik Biro Hukum dan Organisasi BPOM. Untuk mendukung pelaksanaannya, telah dibentuk tim pelaksana SKM yang bertanggung jawab terhadap seluruh tahapan survei, mulai dari penyusunan instrumen hingga analisis hasil survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner berbasis aplikasi SapaAPIP yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 11 pertanyaan yang mencakup 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei ini dilakukan secara periodik satu kali setiap tahun dengan waktu pelaksanaan rata-rata delapan bulan hingga diperoleh hasil indeks kepuasan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran selama enam tahun terakhir, tren nilai IKM Balai POM di Payakumbuh menunjukkan pola yang cenderung meningkat, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Secara keseluruhan, hasil tersebut menggambarkan adanya komitmen berkelanjutan dari Balai POM di Payakumbuh dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan dan inovasi dalam pemberian layanan kepada masyarakat. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Balai POM di Payakumbuh dapat dilihat melalui grafik berikut:

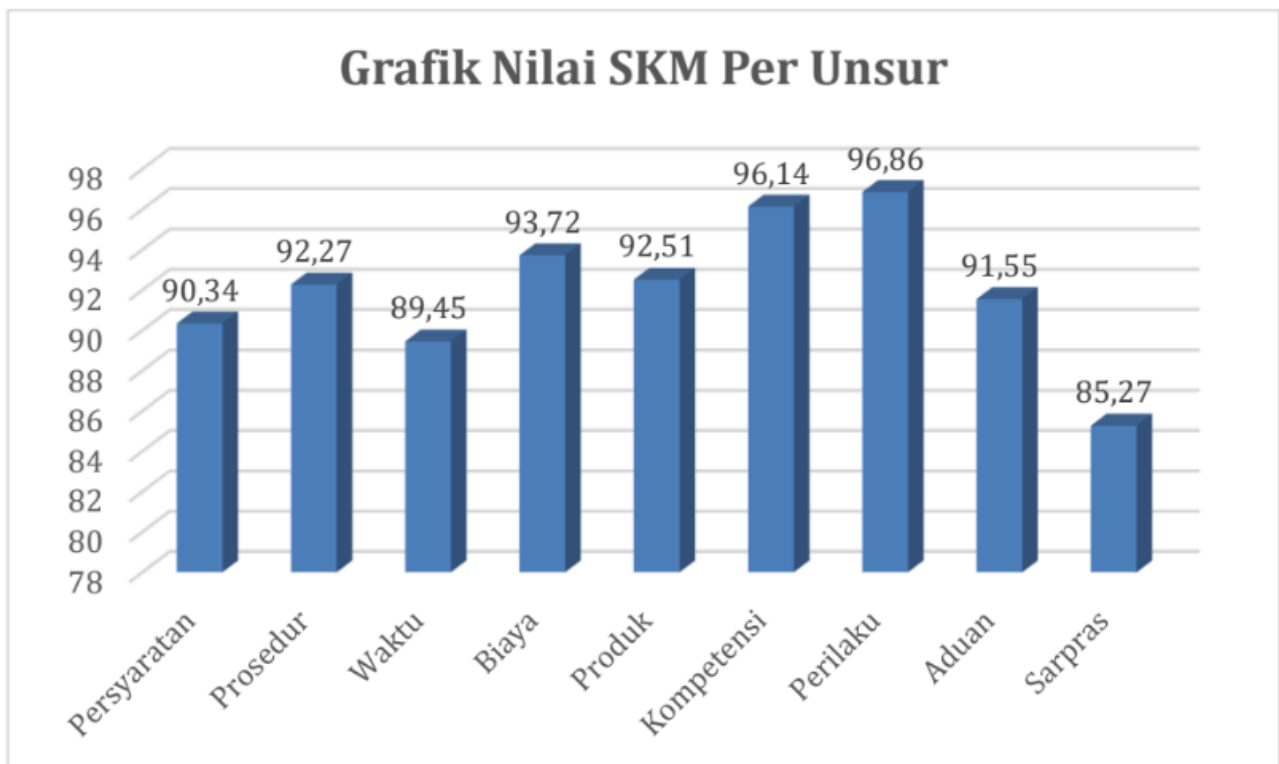


Gambar 1.9 Trend IKM 2020-2025

Survei Kepuasan Masyarakat terbaru dilaksanakan Balai POM di Payakumbuh pada Tahun 2025. Populasi penerima layanan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 323 orang, dengan 69 responden sebagai sampel survei yang ditetapkan berdasarkan ketentuan PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017. Hasil survei tahun 2025 ini menjadi dasar evaluasi terhadap capaian kinerja pelayanan publik serta perumusan strategi peningkatan mutu pelayanan Balai POM di Payakumbuh ke depan.

Tabel 1.3 Rincian jumlah populasi dan sampel SKM 2025

No	Jenis Pelayanan	Populasi	Sampel
1	Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	2	1
2	Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	10	3
3	Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	311	65
Jumlah		323	69



Gambar 1.10 Grafik Nilai SKM Per Unsur

Dari hasil analisis data SKM, dari ke sembilan unsur penilaian Survei Kepuasan Masyarakat, tiga unsur yang memiliki nilai paling tinggi adalah unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu U7 Perilaku pelaksana dengan nilai 96,86 dan U6 Kompetensi dengan nilai 96,14 dan U4 Biaya dengan nilai 93,72. Ini membuktikan bahwa masyarakat sudah mengapresiasi perilaku, kompetensi pelaksana dan biaya pada layanan Balai POM di Payakumbuh. Sedangkan kami mengidentifikasi bahwa aspek U9 Sarana Prasarana dengan nilai 85,27, U3 Waktu dengan nilai 89,45 dan U1 Persyaratan dengan nilai 90,34 merupakan tiga isu yang masih memerlukan perbaikan dibuktikan unsur tersebut memiliki nilai paling rendah dibanding unsur lainnya dan paling sering disorot oleh masyarakat. Secara kuantitatif, ketiga dimensi ini memiliki nilai yang masih dapat ditingkatkan. Sarana dan prasarana mendapatkan nilai terendah yaitu 85,27.

Untuk penilaian SKM dilakukan pada tiga layanan yaitu Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), dan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat paling tinggi ada pada layanan Sertifikasi Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dengan nilai 96,30 dan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terendah ada pada layanan Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan dengan nilai 91,77.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Januari hingga Juni 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Sebanyak 69 orang mengisi SKM pada Balai POM di Payakumbuh, Layanan Permintaan Informasi dan Pengaduan menjadi layanan dengan pengguna terbanyak terlihat dari jumlah sampel yang mengisi survei yaitu 65 orang.
- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai POM di Payakumbuh secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik (A) 92,01. Nilai SKM Balai POM di Payakumbuh menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2025.
- Unsur pelayanan yang menjadi prioritas perbaikan yaitu: U9 Sarana Prasarana dengan nilai 85,27, U3 Waktu dengan nilai 89,45 dan U1 Persyaratan dengan nilai 90,34.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam penyusunan Rencana Strategis Balai POM di Payakumbuh Tahun

2025–2029, diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap potensi serta tantangan yang dihadapi Balai POM di Payakumbuh guna merumuskan strategi pengawasan sediaan farmasi dan makanan yang responsif, efektif, dan selaras dengan dinamika pembangunan kesehatan di tingkat lokal maupun nasional. Sebagai bagian dari BPOM, Balai POM di Payakumbuh memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kualitas produk sediaan farmasi dan makanan yang beredar di wilayah kerjanya. Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama ancaman kesehatan yang muncul dan perkembangan teknologi, Balai POM di Payakumbuh harus siap beradaptasi untuk memberikan pengawasan yang lebih baik dan lebih cepat, seiring dengan perkembangan zaman.

Sebagai bagian dari BPOM, Balai POM di Payakumbuh memiliki peran strategis dalam memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk obat dan makanan yang beredar di wilayah kerjanya. Seiring meningkatnya kompleksitas tantangan, termasuk munculnya ancaman kesehatan baru dan perkembangan teknologi yang cepat, Balai POM di Payakumbuh dituntut untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitas pengawasan agar senantiasa mampu merespons kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman secara optimal.

Balai POM di Payakumbuh dihadapkan pada berbagai potensi serta tantangan strategis yang semakin kompleks. Sebagai langkah penting dalam penyusunan perencanaan jangka menengah, analisis SWOT digunakan sebagai pendekatan fundamental untuk memetakan kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan. Melalui analisis ini kekuatan dan kelemahan organisasi dapat diidentifikasi secara menyeluruh, serta peluang dan ancaman yang relevan dengan dinamika pengawasan obat dan makanan. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan strategi yang tidak hanya memaksimalkan kapasitas yang dimiliki, tetapi juga mampu mengantisipasi hambatan yang berpotensi muncul, sehingga penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Berikut disajikan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) Renstra Balai POM di Payakumbuh Tahun 2025–2029.

1.2.1 Kekuatan (Strength)

Analisis kondisi internal organisasi Balai POM di Payakumbuh bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki, yang akan membantu dalam memahami dan

mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, serta aspek strategis yang memberikan keunggulan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Identifikasi kekuatan ini sangat penting untuk mempertahankan esensi dan eksistensi Balai POM di Payakumbuh, serta merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Balai POM di masa depan. Berikut ini adalah beberapa kekuatan utama yang dimiliki oleh Balai POM di Payakumbuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten, Berintegritas, dan Berdedikasi Tinggi

Balai POM di Payakumbuh memiliki inti Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat kompeten dan loyal, ditunjukkan melalui dedikasi tinggi dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap sediaan farmasi dan makanan.

Kompetensi pegawai Balai POM di Payakumbuh dalam melaksanakan tugas pengawasan sediaan farmasi dan makanan tercermin dari tingkat pendidikan yang relatif tinggi. Komposisi tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai telah menempuh pendidikan tinggi pada jenjang D3 hingga S2, yang mencerminkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan profesional yang memadai untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara efektif dan akuntabel.

Tabel 1.4 Latar Belakang Pendidikan Pegawai Balai POM di Payakumbuh

Latar Belakang Pendidikan	Jumlah	Persentase
D3	5	14.71%
S1	12	35.29%
Profesi	13	38.24%
S2	4	11.76%
Total	34	100.00%

Sumber: Data SIASN BPOM per tanggal 1 Oktober 2025

Berdasarkan Tabel 1.4 yang memuat data tingkat pendidikan pegawai Balai POM di Payakumbuh dapat dilihat bahwa dari 34 pegawai, sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan tinggi, dengan komposisi 14,71% berpendidikan D3, 35,29% berpendidikan S1, 38,24% pendidikan profesi, dan 11,76% berpendidikan S2. Komposisi tersebut mencerminkan bahwa mayoritas

pegawai telah memiliki kompetensi akademik yang memadai dalam menghadapi dinamika tugas di wilayah kerja yang luas. Profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia ini menjadi modal strategis bagi Balai POM di Payakumbuh untuk menjaga kepercayaan publik, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta menghadapi tantangan dan perubahan yang semakin kompleks di masa mendatang.

2. Kemampuan Kolaborasi dengan Stakeholder

Balai POM di Payakumbuh telah membangun kolaborasi yang kuat dan dukungan yang baik dengan pemerintah daerah serta berbagai stakeholder terkait. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi yang lancar, pengawasan bersama, dan sinergi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di daerah. Dengan adanya kolaborasi ini, Balai POM Payakumbuh dapat lebih cepat merespons isu-isu kesehatan yang muncul, khususnya yang berkaitan dengan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Keberadaan Balai POM di Payakumbuh juga diakui secara luas sebagai lembaga yang menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengawasan dengan profesionalisme tinggi, memastikan bahwa hanya produk yang aman dan berkualitas yang sampai ke konsumen. Kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak tidak hanya meningkatkan kualitas pengawasan, tetapi juga memperkuat posisi Balai POM sebagai lembaga yang dapat diandalkan dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat.

Berdasarkan Forum Konsultasi Publik Balai POM di Payakumbuh tahun 2025 terdapat lima unsur utama yang terlibat antara lain pengguna layanan, akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat, dan media. Setiap unsur hadir sebagai representasi kelompok masing-masing untuk memberikan pandangan dan kontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan.

Dalam pelaksanaan forum ini, Balai POM di Payakumbuh menyampaikan informasi mengenai standar layanan yang berlaku. Penyampaian ini bertujuan agar para pemangku kepentingan memahami mekanisme layanan sekaligus memberikan ruang untuk masukan yang konstruktif. Para stakeholder juga menyampaikan harapan agar koordinasi pengawasan obat dan makanan dapat berjalan lebih efektif. Mereka mendorong peningkatan edukasi, asistensi regulasi, serta kegiatan kolaboratif yang melibatkan organisasi profesi dan akademisi sehingga partisipasi kedua unsur tersebut dapat dioptimalkan.

3. Kerja Sama Tim yang Solid

Kerja sama tim yang terjalin di Balai POM Payakumbuh sangat solid, di mana setiap anggota tim saling mendukung dan berkolaborasi dengan baik. Komunikasi yang lancar antar pegawai mempermudah koordinasi dan memaksimalkan kinerja tim. Setiap fungsi bekerja sinergis untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menjaga keamanan obat dan makanan di daerahnya. Kerja sama ini memungkinkan penyelesaian masalah secara lebih efektif dan efisien, serta menjadikan Balai POM di Payakumbuh sebagai unit pelaksana Badan POM yang dapat diandalkan dalam melakukan pengawasan sediaan farmasi dan makanan yang menjadi tanggung jawab di wilayah kerjanya.

4. Kepemimpinan yang Baik dan Lingkungan Kerja yang Kondusif

Kepemimpinan di Balai POM Payakumbuh sangat fleksibel, yang menciptakan suasana kerja yang nyaman dan tanpa tekanan. Pemimpin memberikan kebebasan kepada setiap pegawai untuk menyampaikan ide dan masukan, sehingga mereka merasa dihargai dan dapat berkontribusi secara maksimal. Pendekatan manajerial yang diterapkan bersifat persuasif dan personal, di mana pemimpin lebih mengutamakan komunikasi terbuka dan kolaborasi daripada cara-cara otoriter. Dengan pendekatan ini, setiap anggota tim merasa dihormati dan diberdayakan untuk mengambil bagian aktif dalam proses pengambilan keputusan. Tugas-tugas dibagi dengan jelas, dan setiap individu memiliki peran penting dalam mencapai tujuan bersama, yang membuat suasana kerja semakin produktif dan harmonis. Pemimpin juga sangat memperhatikan kesejahteraan tim, memastikan semua berjalan dengan lancar dan tujuan organisasi tercapai dengan efektif.

5. Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan

Balai POM di Payakumbuh telah memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi dan penyebaran informasi melalui konten yang menarik berhasil menarik perhatian masyarakat. Selain itu, BPOM di Payakumbuh juga telah memaksimalkan penggunaan sistem informasi yang disediakan oleh Badan POM. Digitalisasi proses kerja Badan POM yang dioptimalkan oleh Balai POM di Payakumbuh, melalui sistem

informasi manajemen terintegrasi, aplikasi mobile untuk pemantauan dan pelaporan, serta platform online untuk registrasi dan sertifikasi produk, telah merevolusi cara BPOM beroperasi dan berinteraksi dengan stakeholder. Hal ini menciptakan proses yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh publik. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital telah mendukung Balai POM di Payakumbuh dalam melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

6. Komitmen Balai POM di Payakumbuh dalam mendukung perkembangan UMKM

Balai POM di Payakumbuh, yang memiliki wilayah kerja dengan perkembangan bisnis yang pesat, terutama dalam sektor pangan olahan, seperti rendang, keripik sanjai, dan produk UMKM lainnya, berperan aktif dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayahnya. Banyak pelaku usaha yang terus berinovasi dalam menciptakan produk baru, dan Balai POM berkontribusi secara langsung dalam pendampingan serta asistensi untuk membantu mereka meningkatkan daya saing produk, terutama dalam memperoleh izin edar. Balai POM juga secara masif dan kontinyu melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat serta pelaku usaha, dengan pendekatan sistem jemput bola, yaitu turun langsung ke lapangan untuk memberikan pendampingan dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Dengan cara ini, Balai POM di Payakumbuh turut mendukung peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM di wilayahnya.

Balai POM di Payakumbuh menunjukkan kekuatan yang luar biasa dalam menjalankan tugas pengawasan sediaan farmasi dan makanan, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, loyal, dan berpengalaman. Dengan kepemimpinan yang fleksibel, lingkungan kerja yang kondusif, dan kolaborasi tim yang solid, Balai POM mampu mengelola tugasnya dengan efektif dan efisien. Pemanfaatan teknologi digital, termasuk sistem informasi terintegrasi dan media sosial, memperkuat transparansi dan efisiensi dalam pengawasan serta interaksi dengan masyarakat dan stakeholder. Selain itu, komitmen kuat dalam mendukung perkembangan UMKM, melalui pendampingan dan edukasi yang masif, memastikan bahwa produk yang beredar aman dan berkualitas. Semua ini menjadikan Balai POM di Payakumbuh sebagai lembaga yang andal

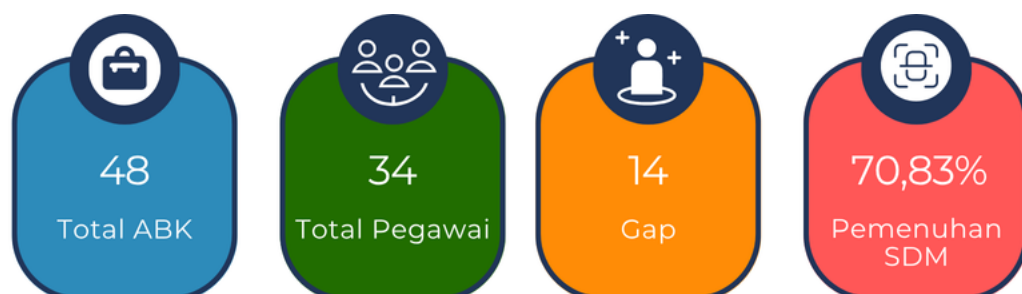
dan berkontribusi signifikan dalam menjaga keamanan produk serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

1.2.2 Weakness

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, Balai POM di Payakumbuh sebagai bagian dari BPOM juga memiliki beberapa area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Meskipun telah menunjukkan kinerja yang baik, ada beberapa aspek yang masih menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsinya. Adapun aspek tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Meskipun telah didukung dengan pegawai yang berintegritas dan berdedikasi tinggi, Balai POM di Payakumbuh masih menghadapi kendala dalam hal jumlah dan distribusi sumber daya manusia. Berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK), dari total kebutuhan sebanyak 48 pegawai, baru terpenuhi sekitar 70,83% atau sebanyak 34 orang pegawai. Kondisi ini menyebabkan beban kerja belum terbagi secara proporsional, terutama setelah perubahan status dari Loka menjadi Balai yang disertai perluasan wilayah kerja dan peningkatan tanggung jawab pengawasan obat dan makanan di tujuh wilayah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Keterbatasan jumlah pegawai tersebut berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan obat dan makanan. Oleh karena itu, penambahan jumlah pegawai dan penguatan kapasitas SDM menjadi langkah strategis untuk menjaga optimalisasi kinerja organisasi.



Gambar 1.12 Kebutuhan Pegawai BPOM v.s Jumlah Eksisting

Sumber: Data SIASN BPOM per tanggal 1 Oktober 2025

Tabel 1.5 Data Kebutuhan SDM Balai POM di Payakumbuh

No	Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
1	Kepala Balai POM di Payakumbuh	Struktural	1	1	0	100%
2	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai POM di Payakumbuh	Struktural	1	1	0	100%
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Fungsional	2	1	1	50%
4	Arsiparis Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
5	Penata Laksana Barang Terampil	Fungsional	3	1	2	33%
6	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	Fungsional	5	1	4	20%
7	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	Fungsional	10	9	1	90%
8	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	Fungsional	14	11	3	79%
9	Perencana Ahli Pertama	Fungsional	1	1	0	100%
10	Pranata Keuangan APBN Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
11	Pranata Komputer Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
12	Pranata SDM Aparatur Terampil	Fungsional	1	1	0	100%
13	Analisis Obat dan Makanan	Pelaksana	0	2	-2	100%
14	Penata Layanan Operasional	Pelaksana	0	2	-2	100%
15	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
16	Arsiparis Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
17	Perencana Ahli Muda	Fungsional	1	0	1	0%
18	Pranata Keuangan APBN Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
19	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Fungsional	1	0	1	0%
20	Pranata Komputer Mahir	Fungsional	1	0	1	0%
21	Pranata SDM Aparatur Mahir	Fungsional	1	0	1	0%

Sumber : Data SIASN BPOM per tanggal 1 Juli 2025

Selain kendala jumlah, masih terdapat kesenjangan kompetensi antar pegawai yang dapat menghambat pemerataan tugas dan efisiensi kerja. Pembagian tugas yang belum seimbang akibat keterbatasan jumlah pegawai menyebabkan sebagian pegawai memikul tanggung jawab yang lebih besar, dan belum

mendapatkan penugasan yang sepenuhnya sesuai dengan kapasitas serta kompetensi yang dimiliki. Ketimpangan ini berpotensi mempengaruhi keharmonisan kerja, menurunkan efisiensi, dan menghambat proses pembelajaran antar pegawai.

Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh perubahan status kelembagaan dari Loka menjadi Balai, yang diikuti oleh penambahan pegawai baru dengan pengalaman dan pemahaman terhadap standar jabatan yang masih dalam tahap penyesuaian. Untuk itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, program pendampingan, serta redistribusi tugas yang proporsional perlu terus dilakukan agar kinerja organisasi tetap optimal, adaptif terhadap perubahan struktur, dan selaras dengan peningkatan cakupan wilayah kerja.

2. Pemahaman dan Penerapan Budaya Organisasi Belum Optimal

Kelemahan berikutnya yang masih ada di Balai POM di Payakumbuh adalah belum optimalnya penerapan budaya organisasi Badan POM di beberapa aspek yang sangat penting untuk memastikan keseragaman dan keselarasan dalam tindakan serta keputusan di dalam organisasi. Hasil survei Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dan Core Values ASN BerAKHLAK Tahun 2025 menunjukkan bahwa penerapan core value ASN 'BerAKHLAK' di lingkungan internal Balai POM di Payakumbuh masih belum optimal, khususnya pada aspek harmonis, loyal, dan adaptif.

Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam membangun lingkungan kerja yang harmonis, loyalitas pegawai terhadap organisasi, serta kemampuan adaptasi pegawai terhadap perubahan. Kurangnya penerapan nilai-nilai tersebut dapat berdampak pada menurunnya kolaborasi, efektivitas komunikasi, dan kesiapan organisasi dalam menghadapi dinamika tugas pengawasan obat dan makanan. Oleh karena itu, penguatan budaya kerja yang mencerminkan nilai-nilai harmonis, loyal, dan adaptif perlu dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat implementasi Reformasi Birokrasi di Balai POM di Payakumbuh.

**Tabel 1.6 Hasil Survei Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (RB)
Tematik dan Core Values ASN BerAKHLAK Tahun 2025**

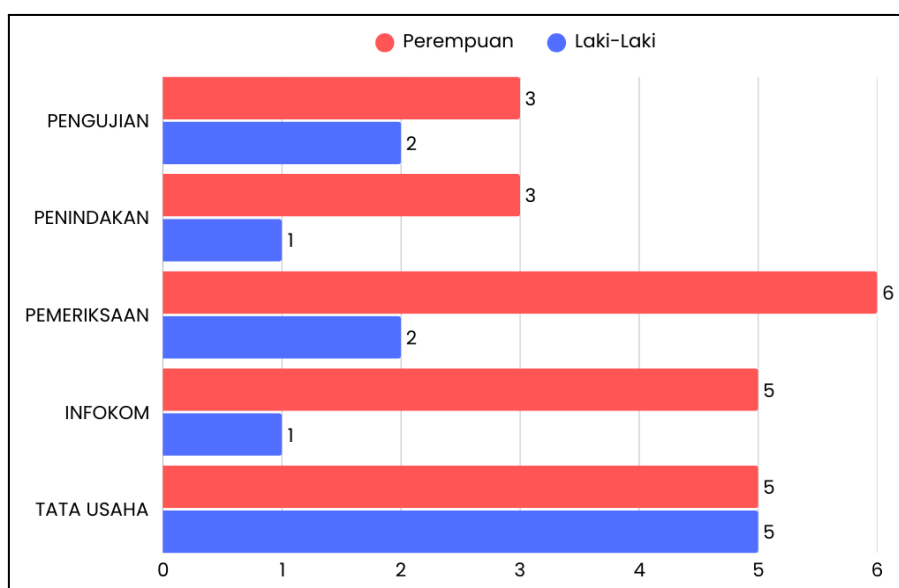
Unit Kerja	Berorientasi Pelayanan	Akuntabel	Kompeten	Harmonis	Loyal	Adaptif	Kolaboratif	Implementation Index 2025
Balai POM di Payakumbuh	66.70%	74.10%	70.40%	48.10%	40.70%	25.90%	59.30%	55.00%
	Cukup Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat	Tidak Sehat	Tidak Sehat	Tidak Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat

Sumber: Sekretaris Utama BPOM

3. Masih Tingginya Ketimpangan Gender di Berbagai Fungsi

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki mandat penting untuk melindungi masyarakat melalui pengawasan terhadap peredaran obat, sediaan farmasi, dan pangan olahan. Untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal, dibutuhkan sumber daya manusia yang profesional, kompeten, serta berkeadilan gender. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan gender di lingkungan internal Balai POM di Payakumbuh yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan.

Isu ketimpangan gender ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyangkut kesetaraan akses terhadap kesempatan, peran dalam pengambilan keputusan, pembagian tugas, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya sensitif terhadap aspek gender.



**Gambar 1.13 Data Komposisi Pegawai Balai POM di Payakumbuh
berdasarkan Fungsi**

Berdasarkan data gender pegawai Balai POM di Payakumbuh terhadap struktur organisasi dan pola kerja, ketimpangan gender tampak pada beberapa aspek, antara lain:

1. Ketimpangan dalam struktur jabatan dan kepemimpinan;
2. Ketimpangan dalam pembagian tugas dan peran;
3. Akses yang masih terbatas terhadap pengembangan kapasitas;
4. Belum meratanya pemahaman mengenai pentingnya pengarusutamaan gender (PUG) dalam tata kelola kelembagaan; serta
5. Fasilitas pendukung yang masih kurang memadai.

Ketimpangan gender internal ini berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan di Balai POM di Payakumbuh. Dampak yang muncul antara lain:

1. Proses pengambilan keputusan yang kurang inklusif;
2. Terbatasnya kapasitas teknis dan regenerasi pengawas, khususnya bagi pegawai laki-laki;
3. Menurunnya kinerja, motivasi, dan iklim kerja yang kondusif.

Pada fungsi Penindakan, ketimpangan gender dapat berpengaruh terhadap efektivitas kegiatan investigasi dan operasi intelijen. Sedangkan pada fungsi Pemeriksaan, ketimpangan gender berpotensi menimbulkan risiko dalam menghadapi pelaku usaha yang tidak kooperatif, serta dapat mengancam keselamatan dan kesehatan petugas di lapangan. Balai POM di Payakumbuh perlu mengupayakan strategi untuk mewujudkan fungsi pengawasan yang lebih efektif, inklusif, dan responsif gender. Dengan memperkuat kebijakan serta praktik kerja yang berpihak pada kesetaraan gender, Balai POM di Payakumbuh dapat meningkatkan kinerja kelembagaan sekaligus menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang inklusif, profesional, dan berkeadilan.

4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang belum Optimal

Kelemahan lainnya yang masih dihadapi oleh Balai POM di Payakumbuh adalah ketergantungan pada fasilitas gedung kantor yang masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Kota Payakumbuh. Hal ini membatasi

kemandirian dalam pengelolaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Payakumbuh. Selain itu, gedung laboratorium yang menjadi salah satu kebutuhan utama untuk mendukung proses pengujian produk masih dalam tahap pembangunan, sehingga pelaksanaan pengujian menjadi terbatas dan masih bergantung pada UPT Badan POM lainnya. Keterbatasan lainnya adalah belum tersedianya pegawai yang sepenuhnya kompeten dalam melakukan pengujian, yang merupakan elemen penting dalam pengawasan obat dan makanan. Semua faktor ini mempengaruhi efektivitas Balai POM Payakumbuh dalam menjalankan tugas pengawasan dan perlu segera ditangani agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien dan sesuai standar.

1.2.3 Opportunity

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan sediaan farmasi dan makanan. Peluang strategis Balai POM di Payakumbuh mencakup berbagai aspek yang dapat memperkuat efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan makanan diantaranya adalah :

1. Pertumbuhan Pasar Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pertumbuhan pasar produk sediaan farmasi dan makanan domestik yang terus berkembang memberikan peluang besar bagi Balai POM di Payakumbuh untuk memperluas dan mengintensifkan pengawasannya, khususnya di wilayah kerja yang mencakup pesatnya sektor pangan olahan dan produk lokal. Dalam konteks ini, Balai POM di Payakumbuh memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan. Melalui pengawasan yang efektif, Balai POM dapat melindungi konsumen dengan memastikan akses ke produk yang aman, serta memberikan kepastian bagi produsen bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Secara strategis, pertumbuhan pasar ini memberikan peluang bagi Balai POM di Payakumbuh untuk mendorong inovasi dalam pengawasan serta meningkatkan reputasi UMKM dalam negeri di tingkat internasional. Dengan memastikan produk memenuhi standar keamanan, Balai POM di Payakumbuh dapat memperkuat kepercayaan konsumen, membuka peluang

ekspor, dan mendukung produk Indonesia untuk bersaing di pasar global.

2. Dukungan dari Stakeholder untuk Penguatan BPOM

Peluang Balai POM di Payakumbuh untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, pelaku usaha sediaan farmasi dan makanan, institusi akademik, serta pemerintah daerah, membuka akses yang lebih luas ke sumber daya dan inovasi terkini. Kerja sama ini memungkinkan pertukaran pengetahuan dan informasi yang bermanfaat, serta pengawasan bersama dalam rangka meningkatkan pengawasan obat dan makanan. Kemitraan dengan universitas, misalnya, dapat mendorong kolaborasi dalam melakukan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), serta memperkuat peran duta keamanan pangan dan duta kosmetik, terutama dalam pengawasan online. Inisiatif ini berpotensi memperluas cakupan pengawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan produk obat dan makanan di era digital.

3. Perkembangan teknologi yang Pesat

Pengembangan dan penerapan teknologi informasi yang terus berkembang memberikan peluang besar bagi Balai POM di Payakumbuh untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses pengawasan, serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait keamanan obat dan makanan. Balai POM di Payakumbuh secara aktif beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk melalui transformasi digital yang semakin maju. Peningkatan penggunaan teknologi digital memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan mempermudah pelayanan publik. Dengan demikian, teknologi tidak hanya mendukung transparansi dalam proses pengawasan, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan yang lebih responsif dan terkini. Semua langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat mendapatkan produk obat dan makanan yang aman, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Payakumbuh.

4. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya

keamanan pangan, Balai POM di Payakumbuh memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas produk yang beredar. Masyarakat yang lebih sadar akan keamanan pangan dapat turut berpartisipasi aktif dalam memastikan bahwa produk obat dan makanan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selain itu, melalui kegiatan seperti SAKA POM, Paguyuban, dan Duta Pangan dan Kosmetik, masyarakat dapat menjadi bagian dari sistem pengawasan yang lebih luas. Kegiatan ini tidak hanya memperkuat pengawasan di tingkat komunitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran Balai POM dalam menjaga keamanan dan kualitas produk. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, pengawasan menjadi lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dan kekhawatiran konsumen.

1.2.4 Threat

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Balai POM di Payakumbuh. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga Balai POM di Payakumbuh dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen "Threats" yang dapat mempengaruhi Balai POM di Payakumbuh dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang:

1. Ketidakpercayaan Masyarakat terhadap kinerja instansi

Ancaman utama yang dihadapi Balai POM di Payakumbuh adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga ini, yang tercermin dalam komentar negatif di media sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang tupoksi (tugas pokok dan fungsi) BPOM. Situasi ini diperburuk oleh berita hoax yang sering beredar dan dipercaya oleh masyarakat, yang semakin merusak citra dan mengurangi kepercayaan terhadap Balai POM. Ditambah dengan peredaran produk ilegal, baik obat, makanan, maupun kosmetik, yang semakin meluas baik secara offline maupun online, semakin sulit bagi Balai POM untuk melakukan pengawasan yang efektif. Platform digital sering menjadi saluran bagi produk ilegal untuk

beredar tanpa pengawasan ketat, meningkatkan risiko bagi konsumen.

Selain itu, perubahan sosial dan budaya yang terjadi di masyarakat, seperti meningkatnya tren konsumsi produk yang menawarkan hasil instan meskipun tidak terjamin keamanannya, memperburuk tantangan yang dihadapi Balai POM. Banyak masyarakat yang lebih tertarik pada produk-produk dengan klaim cepat atau instan, meskipun sering kali produk tersebut ilegal dan berbahaya. Kesadaran yang rendah tentang bahaya produk ilegal ini menjadi ancaman besar bagi upaya Balai POM dalam menjaga keamanan dan kualitas produk yang beredar di pasar. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya produk ilegal dan pentingnya pengawasan obat dan makanan demi melindungi kesehatan publik.

2. Peredaran Produk Ilegal dan Hoaks yang Berkembang

Peredaran produk ilegal, baik dalam bentuk sediaan farmasi dan makanan menjadi ancaman yang semakin meluas dan sulit untuk dikendalikan, baik di pasar offline maupun online. Meskipun upaya pengawasan terus dilakukan oleh Badan POM termasuk Balai POM di Payakumbuh, produk-produk ilegal ini sering kali lolos dari pengawasan yang ketat. Salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi ini adalah penggunaan platform digital yang semakin berkembang.

Platform e-commerce dan media sosial kini menjadi saluran utama bagi penyebaran produk ilegal, yang sering kali tidak melalui sistem pengawasan yang memadai. Produk obat dan makanan yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi standar sering kali dipromosikan tanpa ada pemeriksaan yang mendalam, meningkatkan potensi bahaya bagi konsumen.

Keberadaan produk ilegal yang beredar bebas di dunia maya ini memperburuk tantangan pengawasan. Masyarakat yang semakin tergantung pada belanja online sering kali tidak menyadari risiko yang mereka hadapi ketika membeli produk sediaan farmasi dan makanan dari sumber yang tidak jelas. Kurangnya pengawasan yang efektif di dunia maya memungkinkan produk ilegal ini merambah pasar lebih luas dengan lebih mudah. Ini mengarah pada peningkatan risiko bagi konsumen, yang bisa saja mengonsumsi produk yang membahayakan kesehatan mereka tanpa

mengetahui kualitas atau keamanannya.

Selain itu, berita hoaks yang sering beredar mengenai produk sediaan farmasi dan makanan juga memperburuk situasi. Berita palsu atau informasi yang menyesatkan seringkali mengaburkan pemahaman masyarakat tentang keamanan produk, serta merusak citra lembaga pengawas seperti Badan POM. Ketika masyarakat menerima informasi yang salah atau keliru, terutama terkait dengan masalah keamanan produk, hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan mereka terhadap lembaga pengawas. Ketidakpercayaan ini berdampak langsung pada efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Payakumbuh, karena masyarakat mungkin menjadi kurang peduli dengan upaya pengawasan yang ada, atau malah merasa curiga terhadap tindakan yang diambil.

Secara keseluruhan, peredaran produk ilegal yang semakin meluas, didukung oleh platform digital yang sulit untuk dikontrol, ditambah dengan berita hoax yang beredar di masyarakat, menciptakan sebuah tantangan besar bagi pengawasan Balai POM di Payakumbuh. Semua faktor ini tidak hanya meningkatkan risiko terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga mengurangi efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga ini, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas pengawasan yang ada.

3. Meningkatnya Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM)

Perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat di wilayah Sumatera Barat turut meningkatkan risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan obesitas di berbagai wilayah Indonesia termasuk Sumatera Barat. Kondisi ini tidak hanya menjadi tantangan bagi sektor pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi faktor eksternal yang perlu diantisipasi dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Meningkatnya PTM mendorong adanya pendekatan pengawasan yang lebih proaktif dan berbasis risiko terhadap produk yang berkontribusi terhadap faktor risiko yang menjadi pemicunya.

Meningkatnya PTM berimplikasi terhadap meningkatnya permintaan suplemen dan pangan berklaim kesehatan, termasuk produk-produk yang belum terverifikasi secara ilmiah. Tantangan bagi Balai POM di Payakumbuh

adalah memastikan bahwa produk-produk tersebut memenuhi standar keamanan, mutu, dan klaim yang sesuai.

Pengawasan terhadap produk tembakau merupakan salah satu bentuk intervensi penting dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Sebagai unit pelaksana teknis di daerah, BPOM di Payakumbuh memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan khususnya pada iklan produk tembakau dan rokok elektronik. Pengawasan ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembudayaan hidup sehat di masyarakat, khususnya pada kelompok usia remaja dan dewasa muda yang rentan terpapar pengaruh promosi dan persepsi keliru terkait rokok. Dengan adanya label yang informatif dan peringatan yang tegas, konsumen diharapkan menjadi lebih sadar terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik. Informasi yang benar dan jelas pada kemasan dapat mencegah masyarakat, terutama generasi muda, untuk mulai merokok atau menggunakan rokok elektronik.

4. Resistensi Antimikroba / *Antimicrobial Resistance* (AMR)

Resistensi antimikroba merupakan ancaman serius dan semakin mendesak dalam pelaksanaan pengawasan obat dan pangan di Indonesia. Penggunaan antimikroba yang tidak rasional, baik dalam bidang kesehatan manusia, kesehatan hewan, maupun sektor pertanian, dapat mempercepat munculnya mikroorganisme yang kebal terhadap pengobatan. Kondisi ini berpotensi mengancam efektivitas terapi, meningkatkan risiko penyebaran penyakit yang sulit ditangani, menurunkan keamanan produk pangan asal hewan dan tumbuhan yang terpapar antimikroba, bahkan dapat menyebabkan kematian. Selain itu, resistensi antimikroba juga akan menambah beban biaya kesehatan bagi pemerintah.

Bagi BPOM, AMR bukan sekadar isu kesehatan, melainkan tantangan lintas sektor yang harus dihadapi secara sistematis dan terintegrasi. Dalam lima tahun mendatang, penguatan pengawasan menjadi faktor kunci untuk menghadapi ancaman ini. Langkah strategis yang perlu dilakukan meliputi:

- a. Penguatan regulasi dan pengawasan post-market terhadap peredaran antibiotik dan antimikroba lainnya, termasuk pemantauan residu pada produk pangan;

- b. Digitalisasi sistem pengawasan guna meningkatkan pelaporan, pelacakan, dan analisis data penggunaan antimikroba di seluruh rantai pasok;
- c. Kolaborasi lintas sektor dengan pendekatan One Health bersama kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha, dan masyarakat;
- d. Peningkatan kapasitas laboratorium pengujian untuk menjamin mutu produk obat dan pangan yang beredar; serta
- e. Pelaksanaan edukasi dan komunikasi risiko secara luas kepada pelaku usaha, tenaga kesehatan, dan masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan antimikroba.

Tanpa penguatan peran BPOM sebagai garda terdepan dalam pengawasan obat dan makanan, AMR berpotensi menjadi krisis kesehatan nasional yang dapat melemahkan ketahanan sistem kesehatan dan pangan di Indonesia.

Balai POM di Payakumbuh perlu menjawab tantangan ini melalui kegiatan-kegiatan berikut:

- 1. Melaksanakan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba;
- 2. Memberikan bimbingan teknis terkait pengendalian penggunaan antimikroba kepada penanggung jawab fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 3. Melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat mengenai pengendalian resistensi antimikroba;
- 4. Melaksanakan joint inspection bersama lintas sektor terkait; serta
- 5. Mempublikasikan informasi mengenai upaya pengendalian resistensi antibiotik.

5. Meningkatnya Risiko Insiden KLB Keracunan Pangan

Dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi (MBG) yang berskala nasional, salah satu ancaman strategis yang perlu diantisipasi adalah meningkatnya risiko terjadinya insiden atau Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP). Program ini memiliki rantai proses yang panjang dan kompleks, mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Skala pelaksanaan yang luas serta perbedaan tingkat pemenuhan standar produksi pada Satuan Pelayanan

Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap terjadinya insiden keamanan pangan atau KLB KP.

Insiden keamanan pangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kontaminasi akibat proses pengolahan pangan yang tidak higienis, penyimpanan atau penanganan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan, maupun kurangnya pengawasan dalam rantai distribusi. Dampak dari insiden semacam ini tidak hanya dirasakan secara langsung oleh penerima manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan implikasi sosial yang lebih luas, seperti menurunnya tingkat kepercayaan publik, terganggunya proses pembelajaran di sekolah, hingga berkurangnya legitimasi program MBG sebagai salah satu agenda prioritas nasional.

Dalam konteks pembangunan jangka menengah, isu ini tidak hanya menjadi tantangan teknis, tetapi juga merupakan ancaman strategis terhadap keberlanjutan dan kredibilitas program MBG itu sendiri. Oleh karena itu, Balai POM di Payakumbuh memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin keamanan dan mutu pangan yang digunakan dalam program tersebut.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Balai POM di Payakumbuh perlu memperkuat strategi pengawasan yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis risiko. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor, pengawasan yang berkelanjutan terhadap rantai produksi dan distribusi pangan, peningkatan kapasitas laboratorium pengujian, serta edukasi kepada pihak terkait mengenai pentingnya penerapan standar keamanan pangan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan potensi terjadinya KLB Keracunan Pangan dalam pelaksanaan Program MBG dapat diminimalkan secara signifikan.

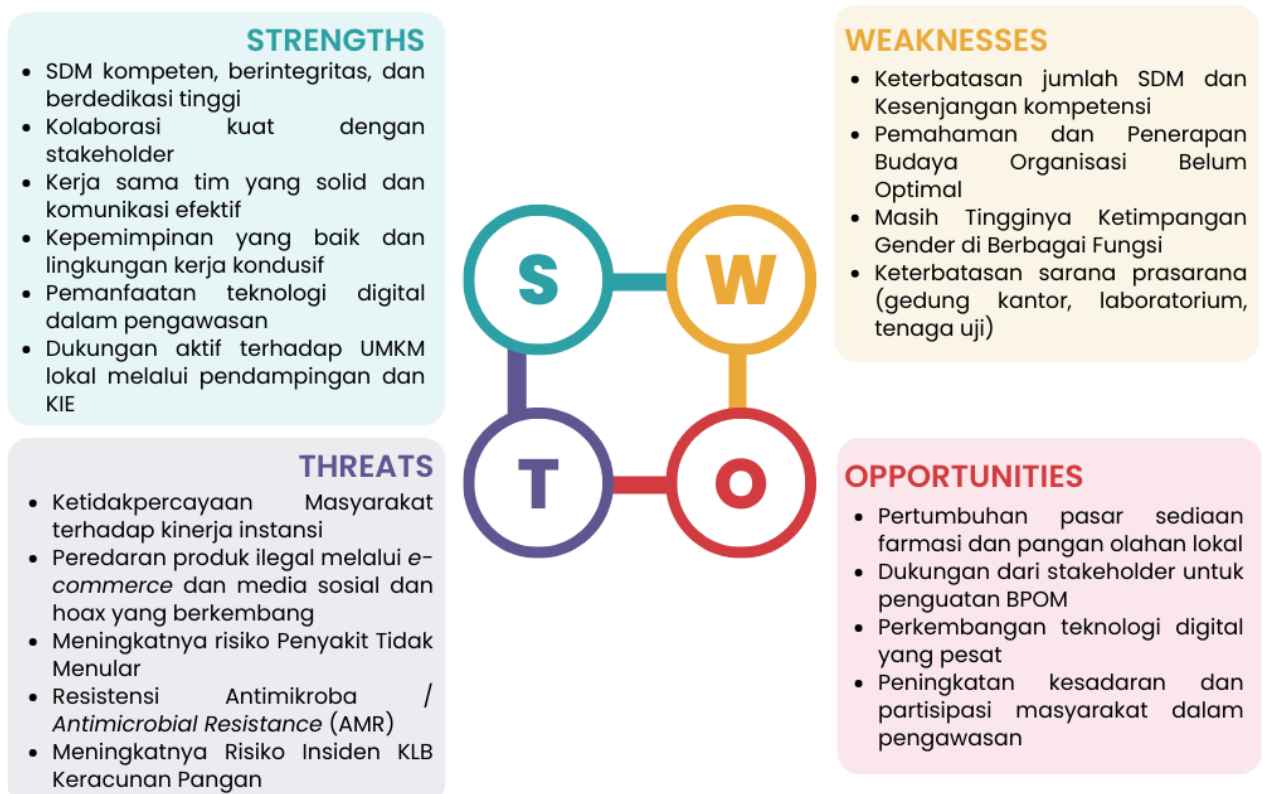
1.2.5 Hasil Analisis SWOT

Pada periode 2025–2029, Balai POM di Payakumbuh dihadapkan pada berbagai dinamika organisasi dan lingkungan yang menuntut kesiapan adaptasi serta penguatan kapasitas kelembagaan. Analisis SWOT menjadi instrumen penting dalam proses penyusunan rencana strategis, karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor internal yang perlu diperkuat maupun faktor eksternal yang harus diantisipasi. Melalui pendekatan ini, kekuatan, kelemahan,

peluang, dan ancaman dapat diidentifikasi secara sistematis untuk mendukung perumusan strategi yang mampu meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh.

Selain itu, pemetaan terhadap peluang dan ancaman eksternal memberikan dasar yang kuat bagi Balai POM di Payakumbuh dalam mengembangkan strategi adaptif dan inovatif guna merespons perubahan yang terjadi di sektor kesehatan dan teknologi. Ringkasan hasil analisis SWOT yang disajikan dalam matriks berikut merupakan evaluasi menyeluruh terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi, sekaligus menjadi acuan dalam menentukan langkah strategis jangka menengah. Dengan demikian, strategi yang dirumuskan diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya internal, memperkuat respons terhadap perubahan lingkungan eksternal, serta memastikan Balai POM di Payakumbuh dapat menjalankan perannya secara konsisten dan efektif dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk obat dan makanan bagi masyarakat.

SWOT Analysis



Gambar 1.11 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

2.1. Visi

Balai POM di Payakumbuh, sesuai dengan tugas dan fungsinya, merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya dalam mendukung pencapaian Visi BPOM. Visi BPOM periode 2025-2029 berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional. Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses

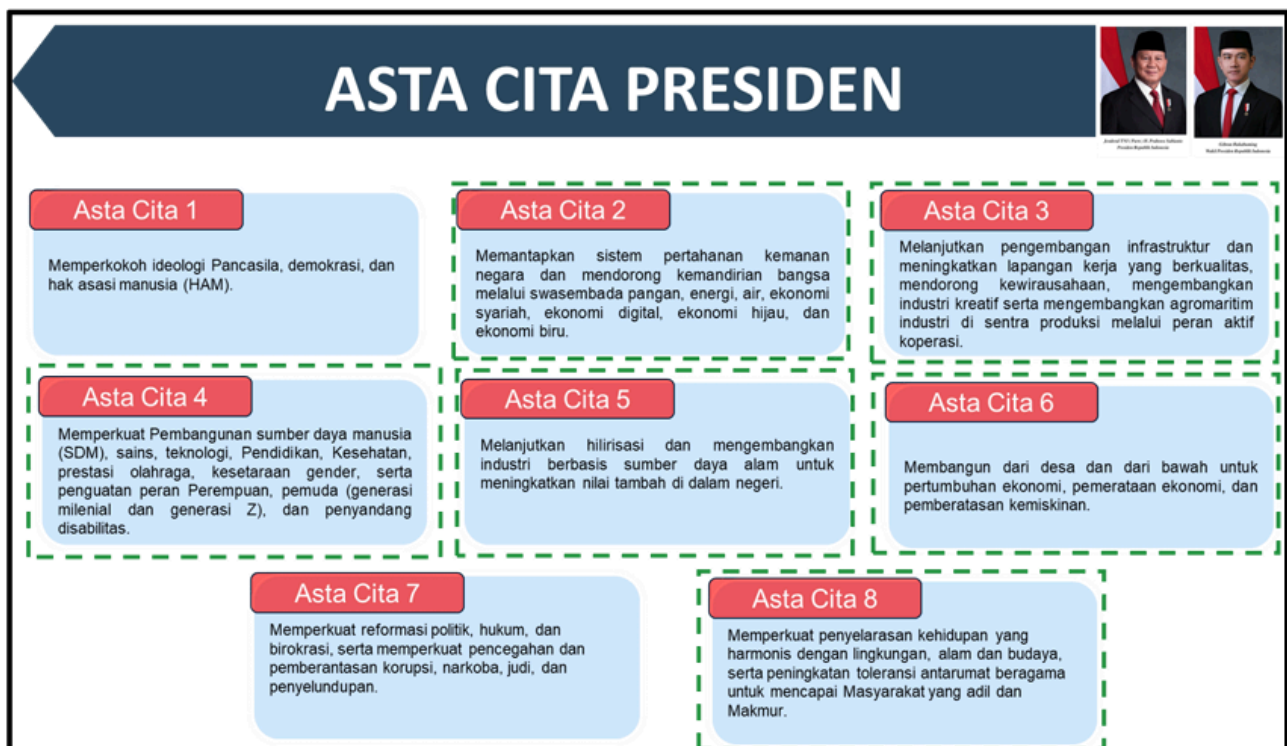
pasar internasional.

4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2.1 Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) , dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran - 88 - aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan

untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai POM di Payakumbuh sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM dalam menjamin keamanan produk obat dan makanan yang beredar di wilayah kerjanya.

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:
Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.40	77.75	79.45	80.70
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.60	66.20	69.30	72.70	76.70
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.40	75.90	77.10	78.50	79.90
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.30	96.35	96.40	96.45	96.50

Balai POM di Payakumbuh, sesuai dengan tugas dan fungsinya, mendukung seluruh tujuan BPOM dengan berupaya mewujudkan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu melalui pengawasan yang efektif dan berbasis risiko, sekaligus mendorong terciptanya masyarakat yang cerdas dalam memilih produk yang aman dan berkualitas. Selain itu, Balai POM di Payakumbuh turut mendukung pertumbuhan dunia usaha dan daya saing industri khususnya bagi pelaku UMKM, dan mendukung

Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dapat membahayakan kesehatan publik. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan semangat untuk membangun organisasi yang profesional, adaptif, efektif, dan efisien guna memberikan layanan publik yang prima serta mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera.

2.4 Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan Balai POM di Payakumbuh disusun berdasarkan visi dan misi Badan POM Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Payakumbuh akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut.

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih

sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen anti korupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- Nilai AKIP UPT BPOM
- Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis dan pelaksanaan kegiatan, sasaran kegiatan Balai POM di Payakumbuh Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai turunan langsung dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan POM Tahun 2025–2029. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Badan POM dengan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai POM di Payakumbuh digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025) Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029) Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			ditindaklanjuti oleh stakeholder Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Indikator: Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
			Terlaksananya kegiatan deteksi

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT Indikator: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM Indikator: Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu Indikator: Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Meningkatnya efektivitas KIE Indikator: Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Jumlah desa pangan aman

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB BPOM	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima Indikator: Indeks RB BPOM	Layanan Publik UPT yang prima Indikator: Indeks Pelayanan Publik UPT
			Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal Indikator: Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM Nilai AKIP UPT BPOM Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Balai POM di Payakumbuh perlu melaksanakan identifikasi risiko pada setiap sasaran kegiatan. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap sasaran yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal. Melalui kegiatan identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat diketahui sejak awal. Dengan demikian, Balai POM di Payakumbuh dapat menyiapkan langkah antisipatif serta strategi mitigasi yang tepat, sehingga pencapaian sasaran kegiatan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien. Proses identifikasi risiko ini menjadi bagian penting dari perencanaan strategis, agar pengelolaan risiko dapat dilakukan secara sistematis dan terukur dalam mendukung peningkatan kinerja organisasi. Berikut merupakan hasil identifikasi indikasi risiko terhadap sasaran kegiatan Balai POM di Payakumbuh.

Tabel 2.3 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan Balai POM di Payakumbuh

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Meningkatnya jumlah kasus KLB KP pada area pengawasan Balai POM di Payakumbuh	- Memastikan keamanan dan mutu pangan melalui pengawasan SPPG, Bimtek terhadap Pengawas, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), SPPG, serta dukungan laboratorium untuk mendeteksi cemaran dan penanganan KLB KP. - Koordinasi dengan BGN terkait pengawasan SPPG dan pelatihan terhadap SPPI, Penjamah Pangan di SPPG dan penerima manfaat.	Infokom, Pengujian, Pemeriksaan, Penindakan
		Peredaran produk Sediaan Farmasi yang tidak sesuai standar	Intensifikasi pengawasan di sarana produksi / distribusi	Pemeriksaan, Pengujian
		Tidak terpenuhinya komponen Standar Ruang Lingkup, Peralatan, dan Kompetensi Laboratorium dalam memenuhi kebutuhan Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Payakumbuh	Perencanaan penambahan ruang lingkup pengujian, pengusulan pengadaan (pendanaan) pemenuhan peralatan laboratorium dan perencanaan peningkatan kompetensi petugas laboratorium	Pengujian
		Adanya praktik penyaluran dan penyerahan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian yang meningkatkan kemungkinan resistensi antimikroba	- Peningkatan literasi dan edukasi masyarakat dengan melakukan kampanye nasional terkait penggunaan antibiotik yang bijak; - Melakukan pencegahan melalui penguatan regulasi dan implementasi standarisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) penyerahan antibiotik di fasilitas pelayanan kefarmasian, dengan penekanan pada kewajiban resep dari tenaga medis.	Infokom, Pemeriksaan
		Masih beredarnya produk Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang mengandung bahan kimia obat atau bahan berbahaya	Intensifikasi pengawasan Obat Bahan Alam dan Kosmetik di fasilitas peredaran	Pemeriksaan, Penindakan

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan
		Ketidakpatuhan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/tindak lanjut hasil pengawasan BPOM	- Pendampingan pelaku usaha; - Pendampingan oleh petugas BPOM baik melalui pengawasan pre market maupun post market - Pemberian sanksi sesuai ketentuan berupa peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara kegiatan, dan rekomendasi pencabutan izin kepada sarana peredaran	Pemeriksaan
		Tidak semua rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Peningkatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemerintah daerah serta institusi lain di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.	Pemeriksaan, Infokom
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Ketidakpatuhan Pelaku Usaha terhadap Standar Fortifikasi	Intensifikasi kegiatan pembinaan dan sosialisasi regulasi, penerapan sanksi administratif bagi pelanggar, serta peningkatan frekuensi inspeksi berbasis risiko.	Pemeriksaan
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Amplifikasi KIE belum sepenuhnya menjangkau kelompok sasaran secara optimal	Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor melalui penyusunan dokumen kerja sama, penyusunan rencana aksi serta monitoring dan evaluasi.	Infokom
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Penerapan Cara Produksi yang baik tidak dilaksanakan secara konsisten dan sesuai ketentuan pada UMKM Obat Bahan Alam Kosmetik, dan UMK Pangan Olahan	- Program pendampingan dan edukasi bagi UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik. - Program pendampingan dan edukasi bagi UMKM Pangan Olahan. - Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap progres pendampingan UMK. - Fasilitasi bimbingan keamanan dan mutu Obat Bahan Alam dan Kosmetik dalam pemenuhan CPOTB Bertahap/CPKB. - Fasilitasi bimbingan keamanan pangan dalam	Pemeriksaan, Infokom

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan
			pemenuhan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB). - Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan K/L, perguruan tinggi, dan asosiasi untuk menjalin kerja sama terkait dukungan kemandirian UMKM dalam menerapkan standar keamanan dan mutu.	
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terhambatnya proses penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	- Pembangunan kesepahaman antara BPOM (PPNS), Kepolisian (Korwas PPNS), dan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum), dalam penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. - Koordinasi penanganan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Kejaksaan Agung/Tinggi/Negeri - Peningkatan kompetensi PPNS BPOM dalam pelaksanaan penyidikan perkara Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara berkala	Penindakan
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Masih maraknya tautan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal yang diedarkan secara daring	Memperkuat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait penerapan kebijakan Negative List	Penindakan
		Lemahnya fungsi deteksi terhadap potensi dan/atau indikasi kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, sehingga peluang peredaran produk ilegal tidak segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti.	- Optimalisasi Dashboard Penindakan yang terintegrasi nasional. - Peningkatan kapasitas petugas cegah tangkal, intelijen dan siber. - Penguatan jejaring dan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan fungsi deteksi kejahatan Sediaan Farmasi	Penindakan
7	Layanan Publik UPT yang prima	Tidak tercapainya target Indeks Pelayanan Publik	- Optimalisasi sarana prasarana pelayanan publik, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat proses layanan. - Pengembangan inovasi pelayanan berbasis kebutuhan	Sertifikasi, Infokom

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan
			masyarakat (user-oriented). - Menetapkan mekanisme tindak lanjut terhadap hasil evaluasi dan keluhan publik.	
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Adanya penerimaan gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang pegawai dalam pelaksanaan tugas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	- Kebijakan anti korupsi antara lain pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, dan WBS/pengaduan Masyarakat. - Monitoring dan evaluasi pelaporan '(Benturan Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat, Gratifikasi seluruh Unit Kerja). - Sosialisasi Anti Fraud. - Penguatan nilai-nilai anti penyuapan dalam kerangka kerja sistem manajemen pengawasan obat dan makanan	Tata Usaha, Infokom, Pemeriksaan, Penindakan, Pengujian

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas

respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.

3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat. Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan pre market dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Payakumbuh mendukung pelaksanaan dan pencapaian seluruh arah kebijakan BPOM. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat daerah diarahkan untuk memperkuat efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, sejalan dengan prioritas nasional dalam mewujudkan produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui sinergi dengan pemerintah daerah, lintas sektor, pelaku usaha, dan masyarakat, Balai POM di Payakumbuh menjadi garda terdepan dalam penerapan kebijakan BPOM di lapangan, memastikan pelaksanaan pengawasan yang terukur, kolaboratif, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan publik.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Payakumbuh

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Badan POM periode 2025-2029, Balai POM di Payakumbuh telah merumuskan arah kebijakan utama untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG:

Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, Balai POM di Payakumbuh mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline:

Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, Balai POM di Payakumbuh meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.

3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:

Balai POM di Payakumbuh fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya

saing, dan memperluas akses pasar.

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengkonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.

5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

Balai POM di Payakumbuh memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan Balai POM di Payakumbuh.

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

Balai POM di Payakumbuh berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik:

Balai POM di Payakumbuh memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan arah kebijakan pelaksanaan Rencana Strategis 2025-2029, Balai POM di Payakumbuh menyusun strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan berdasarkan hasil analisis SWOT yang sejalan dengan strategi Badan POM. Perumusan strategi yang komprehensif dan terstruktur berdasarkan analisis SWOT akan berperan sebagai fondasi dalam menentukan

langkah strategis Balai POM di Payakumbuh ke depan. Berikut ini rumusan strategi yang dapat diterapkan Balai POM di Payakumbuh untuk menghadapi tantangan saat ini dan memanfaatkan peluang yang ada, berdasarkan hasil analisis SWOT:

1. Memanfaatkan kekuatan untuk menangkap peluang

Berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh Balai POM di Payakumbuh, berikut adalah rumusan strategi untuk menangkap peluang dalam melaksanakan tugas pengawasan sediaan farmasi dan makanan:

- **Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peningkatan Kapasitas**

Fokus pada pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, serta pemberian sertifikasi untuk memastikan pegawai tetap terampil dan siap menghadapi perkembangan baru dalam pengawasan sediaan dan makanan. Dengan memperkuat pengetahuan teknis dan keterampilan komunikasi, Balai POM di Payakumbuh dapat lebih efektif beradaptasi dengan kebutuhan organisasi

- **Meningkatkan Kolaborasi dengan Stakeholder**

Memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah, UMKM, serta lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan pengawasan obat dan makanan. Ini bisa dilakukan dengan memperbanyak kegiatan bersama, seperti seminar, forum diskusi, atau kerja sama dalam proyek pengawasan produk pangan dan obat.

- **Optimalisasi Kerja Sama Tim untuk Peningkatan Efisiensi**

Memperkuat komunikasi dan koordinasi antar tim dengan memanfaatkan teknologi yang lebih baik. Penggunaan platform kerja berbasis teknologi, seperti aplikasi pengawasan mobile, dapat membantu tim memantau dan melaporkan secara langsung di lapangan. Selain itu, memperbaiki saluran komunikasi digital, seperti video call dan pesan instan, akan mempercepat pertukaran informasi, memastikan tim dapat merespons dengan cepat, dan mempermudah kerja sama antar anggota tim untuk menjalankan tugas pengawasan dengan lebih efektif dan efisien.

- **Memanfaatkan Teknologi Digital untuk Meningkatkan Pengawasan dan Transparansi**

Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi manajemen terintegrasi dan aplikasi mobile untuk pengawasan produk, serta memperluas penggunaan

media sosial dan platform digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang produk aman dan standar pengawasan yang berlaku. Pemanfaatan Integrasi teknologi terbaru dalam pengelolaan data yang dapat meningkatkan efisiensi pengawasan dan pemantauan.

- **Meningkatkan Peran dalam Mendukung Perkembangan UMKM**

Melanjutkan dan memperluas program pendampingan dan edukasi kepada pelaku UMKM, memberikan informasi yang tepat mengenai regulasi dan izin edar, serta mengedukasi mereka tentang pentingnya mematuhi standar keamanan dan kualitas produk. Program “jemput bola” dalam memberikan asistensi kepada UMKM akan memperkuat hubungan antara Balai POM di Payakumbuh dan sektor UMKM lokal.

- **Meningkatkan Komitmen pada Transparansi dan Akuntabilitas**

Menerapkan kebijakan pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel, serta menyediakan platform bagi masyarakat untuk melaporkan produk ilegal atau yang tidak memenuhi standar. Meningkatkan partisipasi publik melalui platform digital untuk memastikan pengawasan yang lebih efektif dan mendekatkan layanan pengawasan kepada masyarakat.

- **Memperluas Keterlibatan dalam Pengawasan Produk Online**

Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal yang beredar melalui platform digital dengan menggandeng perusahaan teknologi dan penyedia platform e-commerce. Ini termasuk penerapan sistem pemantauan berbasis teknologi dan penggunaan algoritma untuk mendeteksi produk yang tidak terdaftar atau ilegal.

- **Penguatan Citra dan Kepercayaan Masyarakat**

Melakukan kampanye besar-besaran mengenai pentingnya pengawasan obat dan makanan, baik melalui media sosial maupun kerja sama dengan media massa. Fokus pada edukasi masyarakat tentang cara membedakan produk yang aman dan produk yang berbahaya, serta peran penting Balai POM dalam melindungi konsumen.

2. Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman

Berikut adalah rumusan strategi untuk mengatasi ancaman ketidakpercayaan masyarakat dan stakeholder terhadap Balai POM di Payakumbuh:

- **Meningkatkan Transparansi dan Komunikasi**

Memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk menyebarkan informasi yang akurat mengenai produk yang diawasi dan terdaftar di Balai POM di Payakumbuh dan Menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai tugas dan fungsi Balai POM di Payakumbuh serta proses pengawasan yang dilakukan.

- **Edukasi dan Sosialisasi Berkelanjutan**

Melakukan edukasi secara rutin kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan obat dan makanan melalui berbagai saluran komunikasi dan Menanggapi dan membenarkan informasi yang salah atau hoaks terkait produk obat dan makanan di media sosial atau media lainnya.

- **Meningkatkan Keterlibatan Stakeholder**

Meningkatkan kolaborasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah, pelaku UMKM, serta masyarakat melalui forum komunikasi rutin dan kegiatan bersama dan Memperluas pendekatan jemput bola dalam pendampingan UMKM untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan kualitas.

- **Meningkatkan Respons Terhadap Keluhan dan Isu yang Muncul**

Meningkatkan pelayanan publik dengan mempercepat respons terhadap keluhan atau masalah yang muncul dari masyarakat atau stakeholder terkait dan membuka kanal pengaduan yang lebih mudah diakses serta menindaklanjuti laporan dengan cepat dan transparan.

- **Meningkatkan Kepercayaan melalui Pelayanan yang Profesional**

Menjamin bahwa pengawasan dilakukan secara profesional, objektif, dan tidak diskriminatif, sehingga masyarakat merasa lebih percaya pada integritas Balai POM dan menunjukkan dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas untuk memastikan hanya produk yang aman dan berkualitas yang beredar di pasaran.

3. Memperbaiki kelemahan dengan memanfaatkan peluang

Untuk memperbaiki kelemahan yang dihadapi Balai POM di Payakumbuh, langkah-langkah berikut dapat diambil dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada:

- **Pemenuhan Jumlah ABK yang Masih Rendah**

Meminta dukungan pemerintah pusat untuk dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk perekrutan CASN yang lebih banyak, memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi pegawai yang sudah ada. Selain itu, memperkuat kemitraan dengan sektor swasta dalam hal pendampingan dan pengawasan untuk meringankan beban pengawasan yang ada.

- **Gap Kompetensi Antar Pegawai**

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai Balai POM di Payakumbuh, diperlukan perencanaan pelatihan yang sistematis melalui pemetaan kebutuhan pelatihan berdasarkan jabatan dan tugas masing-masing pegawai. Pelatihan tersebut meliputi keterampilan teknis dan pelatihan soft skills seperti komunikasi efektif, kolaborasi tim, dan manajemen waktu juga penting untuk meningkatkan efisiensi kerja. Pelatihan dapat dilakukan dengan metode tatap muka, online, atau workshop, menggunakan sumber daya internal maupun eksternal, untuk memastikan pegawai memiliki keterampilan yang relevan dengan tugas dan meningkatkan kinerja organisasi.

- **Pemahaman dan Penerapan Budaya Organisasi yang Belum Optimal**

Menggunakan teknologi untuk memperkuat budaya organisasi yang lebih transparan dan terbuka. Mengadakan pelatihan atau workshop untuk seluruh pegawai guna memantapkan nilai-nilai “BerAKHLAK”, dengan melibatkan masyarakat melalui kegiatan edukasi dan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap budaya internal. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, pegawai dapat merasakan dukungan yang lebih besar, sehingga memperkuat rasa tanggung jawab dan kolaborasi.

- **Sistem Pengelolaan Keuangan yang Belum Optimal**

Akan meningkatkan kompetensi pengelola anggaran, manajemen waktu, dan urutan prioritas, Balai POM di Payakumbuh perlu melaksanakan pelatihan yang fokus pada pengelolaan anggaran yang efisien, manajemen waktu dengan teknik seperti Eisenhower Matrix, serta cara menyusun prioritas tugas berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap tujuan organisasi. Pemimpin juga perlu secara berkala memantau dan mengevaluasi kinerja pegawai, dengan memberikan umpan balik konstruktif serta menggunakan alat digital untuk memantau progres pekerjaan. Evaluasi dilakukan melalui

penilaian hasil tugas dan keputusan yang diambil, serta perencanaan langkah perbaikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan.

- **Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Belum Optimal**

Dalam lima tahun ke depan, pemenuhan sarana dan prasarana di Balai POM Payakumbuh, termasuk pembangunan gedung laboratorium dan fasilitas pengujian, akan menjadi prioritas utama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja. Pembangunan gedung laboratorium yang telah direncanakan harus segera diselesaikan agar proses pengujian dapat dilakukan secara mandiri dan efisien. Selain itu, dukungan dari BPOM pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan, baik dari sisi anggaran, sumber daya, maupun kebijakan yang mendukung. Kerjasama ini akan memastikan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai, serta mempercepat proses pengembangan fasilitas pengujian yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di masa depan.

4. Mencegah ancaman dengan mengatasi kelemahan

Strategi untuk mencegah ancaman dengan mengatasi kelemahan yang dihadapi oleh Balai POM di Payakumbuh dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- **Peningkatan Jumlah dan Kompetensi ABK**

Mengatasi kekurangan jumlah ABK yang hanya mencapai 70,83% dengan mengajukan tambahan pegawai melalui anggaran dari BPOM pusat. Selain itu, mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai secara rutin untuk mengurangi gap kompetensi antar pegawai, memastikan distribusi tugas yang lebih merata, dan meningkatkan efektivitas tim dalam menjalankan tugas pengawasan.

- **Penguatan Budaya Organisasi**

Meningkatkan penerapan budaya organisasi yang lebih konsisten, dengan fokus pada nilai "BerAKHLAK" terutama untuk adaptif, kolaboratif, dan harmonis yang masih rendah dalam lingkungan internal. Langkah ini melibatkan sosialisasi dan pelatihan bagi pegawai untuk membangun suasana kerja yang lebih harmonis, memperkuat komunikasi yang terbuka,

serta memastikan bahwa seluruh pegawai memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam setiap tindakan.

- **Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Manajemen Waktu**

Untuk mengatasi masalah pengelolaan keuangan yang belum optimal, Balai POM Payakumbuh perlu menambah pegawai yang memiliki keahlian dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya, serta melaksanakan pelatihan dalam manajemen waktu dan prioritas. Pemantauan anggaran secara berkala serta evaluasi kinerja yang terstruktur akan memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien dan mendukung pencapaian tujuan pengawasan.

- **Pemenuhan Sarana dan Prasarana**

Proses pembangunan sarana dan prasarana ini telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2024, pembangunan gedung laboratorium telah dimulai dan diharapkan fasilitas ini dapat beroperasi secara efektif pada tahun 2026 mendatang. Dalam beberapa tahun ke depan, diharapkan sarana dan prasarana Balai POM di Payakumbuh telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Dengan tersedianya fasilitas ini akan meningkatkan kapasitas pengujian, mempercepat, dan meningkatkan akurasi pengawasan terhadap sediaan farmasi dan makanan yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh.

- **Peningkatan Pengawasan Terhadap Produk Ilegal dan Hoaks**

Untuk menghadapi peredaran produk ilegal dan penyebaran berita hoaks, Balai POM di Payakumbuh perlu meningkatkan pengawasan terhadap platform digital, serta bekerja sama dengan e-commerce dan media sosial untuk membatasi distribusi produk ilegal. Selain itu, perlu dilakukan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya produk ilegal dan pentingnya mengakses informasi yang benar melalui kanal resmi. Keterlibatan masyarakat sebagai duta keamanan pangan juga perlu diperkuat untuk menciptakan pengawasan yang lebih efektif di tingkat komunitas.

- **Adaptasi Teknologi**

Dalam menghadapi ancaman terkait dengan teknologi. Implementasi sistem digital yang lebih efisien dan real-time akan memperkuat pengelolaan data serta meningkatkan respon cepat terhadap masalah yang muncul.

Penerapan teknologi ini juga akan membantu mengoptimalkan proses pengawasan yang lebih transparan dan responsif.

Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Payakumbuh
2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG	Meningkatkan efektivitas pengawasan pre-dan post-market sediaan farmasi serta pangan olahan melalui optimalisasi sistem pengawasan, pemanfaatan teknologi digital untuk deteksi dini dan pelaporan farmakovigilans, perluasan pengawasan terhadap produk dan sarana tidak berizin, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal terhadap peredaran produk obat dan makanan ilegal melalui peningkatan kegiatan intelijen pengawasan, operasi terpadu lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi digital secara proaktif. Pendekatan kolaboratif dengan aparat penegak hukum, dinas terkait, serta pemerintah daerah
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah kerja agar mampu memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi produk.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Meningkatkan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi untuk memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk aman dan bermutu serta mendorong peran masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, dan organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan pengawasan serta mendorong efektivitas pembinaan pelaku usaha.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan kompetensi pegawai, optimalisasi sarana prasarana pengawasan, serta modernisasi laboratorium untuk mendukung kecepatan dan akurasi pengujian.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Meningkatkan implementasi Reformasi Birokrasi melalui pelayanan publik berbasis elektronik, penyederhanaan proses perizinan, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai POM di Payakumbuh melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia; dan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM. Adapun kegiatan prioritas yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Payakumbuh dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Payakumbuh mencakup pengawasan pre-market dan post-market terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, termasuk pengawasan terkait Program Makan Bergizi Gratis. Namun demikian, pelaksanaan pre-market control dilakukan dalam ruang lingkup kewenangan tertentu dan tidak mencakup penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Balai POM di Payakumbuh juga melaksanakan fungsi manajerial yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan internal untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.

Seluruh upaya tersebut dijalankan sebagai bagian dari kontribusi Balai POM di Payakumbuh dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM, melalui peningkatan efektivitas pengawasan, pelayanan publik yang berkualitas, serta penguatan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

a. Pemeriksaan Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Pengawasan sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara rutin dilakukan untuk memantau pemenuhan persyaratan terhadap standar yang ditentukan. Peningkatan kualitas sarana produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Peningkatan kualitas sarana produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan melalui kegiatan strategis berikut.

1. Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi terhadap Renlak yang telah disusun;
2. Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul pemeriksaan sarana produksi dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutakhiran database sarana produksi, *track record* sarana produksi, analisis data serta tindak lanjut dalam kerangka pengawasan;
3. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana produksi;
4. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana produksi

b. Pemeriksaan Sarana Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Kepatuhan sarana distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam penerapan regulasi atau standar dalam rantai distribusi berperan penting dalam penjaminan khasiat, mutu dan keamanan produk sebelum dikonsumsi oleh konsumen. Peningkatan kualitas sarana distribusi dilakukan melalui kegiatan strategis berikut.

- Meningkatkan komitmen pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi terhadap Renlak yang telah disusun berdasarkan Kajian Analisis Risiko;
- Meningkatkan komitmen pelaksanaan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) serta mendukung optimalisasi fungsi SIPT modul pemeriksaan sarana distribusi dalam menunjang sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk pemutakhiran database sarana

distribusi, track record sarana distribusi, analisis data serta tindak lanjut dalam kerangka pengawasan;

- Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan sarana distribusi; d. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana distribusi serta tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana distribusi

c. Sertifikasi Sarana Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Penjaminan kepatuhan sarana produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam penerapan regulasi atau standar dalam melakukan kegiatan produksi dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikasi Produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (Sertifikat CPOB, CPKB CPOTB dan CPPOTB). Beberapa Langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan sertifikasi sarana produksi adalah sebagai berikut.

- Mempersiapkan baseline data sarana produksi yang berada di wilayah pengawasan Balai POM di Payakumbuh lengkap dengan status sertifikasi produksinya;
- Berkomunikasi intensif dengan sarana produksi, terutama saat inspeksi rutin mengenai pentingnya program Sertifikasi sarana produksi;
- Memfasilitasi sarana produksi terhadap kebutuhan desk CAPA sebagai dukungan untuk penyelesaian CAPA sertifikasi;
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sarana produksi termasuk koordinasi dengan BPOM.

d. Sertifikasi Sarana Distribusi Obat

Seperti halnya Sarana Produksi, penjaminan kepatuhan sarana produksi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dalam penerapan regulasi atau standar dalam melakukan kegiatan distribusi, dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikasi Distribusi Obat yang saat ini masih diterapkan kepada sarana PBF. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan untuk mendukung keberhasilan sertifikasi sarana distribusi antara lain:

- Mempersiapkan baseline data sarana distribusi yang berada di wilayah pengawasan Balai POM di Payakumbuh lengkap dengan status sertifikasi distribusinya;
- Berkomunikasi intensif dengan sarana distribusi, terutama saat inspeksi rutin mengenai pentingnya program Sertifikasi sarana distribusi;
- Memfasilitasi sarana distribusi terhadap kebutuhan desk CAPA sebagai dukungan untuk penyelesaian CAPA sertifikasi; dan
- Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sarana produksi termasuk koordinasi dengan BPOM

e. Komunikasi, Informasi, Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mutu dan keamanan Sediaan Farmasi serta Pangan Olahan yang beredar. Dengan demikian, masyarakat menjadi lebih cerdas dan selektif dalam memilih produk obat dan makanan yang dikonsumsi. Adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan KIE antara lain:

- Pelaksanaan KIE mengenai Obat dan Makanan Aman dilakukan secara luas agar seluruh lapisan masyarakat di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh dapat menerima dan memahami informasi tersebut.;
- Melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan bagi pelaku usaha terkait proses perizinan secara lebih intensif.
- Meningkatkan frekuensi sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha agar memahami dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- Memanfaatkan media komunikasi yang efektif dan mudah diakses untuk menyampaikan informasi secara tepat sasaran kepada pelaku usaha dan masyarakat.

f. Pemeriksaan Produk dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Laboratorium sebagai tulang punggung pengawasan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan memenuhi syarat atau tidak. Untuk itu, kualitas sampling dan pengujian sangat mempengaruhi sasaran kegiatan ini.

- g. **Penindakan Tindak Pidana Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**
Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, Balai POM di Payakumbuh berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko.
- h. **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Balai Pengawas Obat dan Makanan**
Balai POM di Payakumbuh tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tugas teknis pengawasan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan manajemen kelembagaan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Dalam rangka memperkuat kapasitas dan kualitas kelembagaan, langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh meliputi:
- Peningkatan kompetensi dan kemampuan aparatur, melalui pendidikan dan pelatihan yang berpedoman pada standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi, guna menunjang pengembangan karier secara berkelanjutan.
 - Pemenuhan kebutuhan SDM secara proporsional, berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) dan kesesuaian dengan kapasitas tugas serta fungsi Balai POM di Payakumbuh.
 - Optimalisasi pengelolaan SDM aparatur, meliputi penyusunan dan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), penerapan disiplin, promosi dan mutasi, pemberian penghargaan, sistem remunerasi, serta penguatan budaya kerja yang berintegritas dan berorientasi hasil.
 - Penguatan tata kelola anggaran, dengan memastikan pemenuhan kebutuhan pendanaan yang dikelola secara efisien, efektif, dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh.

- Peningkatan komitmen penerapan Sistem Manajemen Mutu, termasuk ISO/IEC 9001:2015, ISO/IEC 17025:2008, ISO/IEC 37001:2016, serta penguatan pelaksanaan SAKIP, SPIP, manajemen perubahan, dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi dan upaya menuju organisasi pembelajar (*Learning Organization*).
- Peningkatan mutu sarana dan prasarana, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan.
- Perbaikan tata kelola administrasi dan aset, melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), sistem kearsipan, serta proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan sesuai ketentuan.

2. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), belanja pegawai (gaji), serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Balai POM di Payakumbuh. Pengelolaan BMN dilakukan untuk memastikan sarana dan prasarana operasional tersedia dalam kondisi optimal sehingga kegiatan pengawasan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan tata kelola aset pemerintah.

Di sisi lain, pengelolaan belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji dan komponen terkait, menjadi aspek penting dalam menjaga keberlangsungan kinerja sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi pengawasan. Dukungan yang tepat pada aspek ini memastikan pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan baik, profesional, dan berkesinambungan.

Selain itu, pemeliharaan rutin terhadap fasilitas gedung, peralatan kerja, kendaraan operasional, serta perangkat pendukung lainnya menjadi elemen penting untuk menjaga kesiapan operasional Balai POM di Payakumbuh. Pemeliharaan yang terencana dan tepat waktu membantu mencegah gangguan layanan dan memastikan proses pengawasan tetap berjalan tanpa hambatan.

Secara keseluruhan, kegiatan ini merupakan fondasi pendukung yang menjamin bahwa seluruh aspek teknis pengawasan Obat dan Makanan dapat dilaksanakan

dengan optimal, sekaligus mendukung tercapainya kinerja organisasi sesuai target Reformasi Birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas.

a. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan

Penguatan sinergi internal dan eksternal Balai POM di Payakumbuh merupakan langkah penting untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan obat dan makanan yang optimal. Keberhasilan program dan kegiatan strategis pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan memerlukan keterlibatan aktif para pemangku kepentingan, masyarakat, serta dukungan media. Partisipasi dan kepercayaan publik akan meningkat apabila kehadiran Balai POM di Payakumbuh dirasakan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Oleh sebab itu, setiap upaya perlindungan terhadap keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat serta makanan yang dilakukan perlu disampaikan secara transparan dan berkelanjutan kepada masyarakat.

b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM

Kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam mendukung keberhasilan Balai POM di Payakumbuh dalam mewujudkan visi dan misinya. Dengan mempertimbangkan tuntutan yang tinggi dari para pemangku kepentingan terhadap kinerja pengawasan, pengelolaan SDM difokuskan pada: (1) penerapan sistem merit secara konsisten, (2) pelaksanaan manajemen talenta untuk pembinaan karier berkelanjutan, (3) pengembangan dan implementasi strategi pembelajaran yang terintegrasi, serta (4) peningkatan kompetensi digital ASN. Manajemen SDM aparatur dilaksanakan berdasarkan prinsip sistem merit, yakni kebijakan dan pengelolaan SDM yang berlandaskan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara objektif, adil, dan tanpa diskriminasi.

Selain itu, sarana dan prasarana juga menjadi elemen pendukung yang esensial dalam pelaksanaan program kerja. Oleh karena itu, pengelolaannya perlu dilakukan secara akuntabel, mencakup perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, serta pemeliharaan untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan.

c. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan

Pemanfaatan Teknologi Informasi kini menjadi aspek krusial dalam mendukung kinerja Balai POM di Payakumbuh agar pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Pengelolaan sistem informasi, komunikasi, serta data terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan diarahkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan strategis di bidang pengawasan melalui optimalisasi infrastruktur dan sistem teknologi informasi yang dimiliki.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Badan POM pada periode 2025- 2029, Balai POM di Payakumbuh sebagai unit pelaksana telah menyusun matriks kinerja pembangunan. Matriks ini menjadi acuan dalam memperkuat pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerjanya. Sasaran strategis yang tercantum dalam matriks tersebut mengacu dengan visi dan misi Badan POM, serta dilengkapi dengan indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang dirancang untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat secara optimal.

Indikator dan target dalam matriks ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mencapai hasil yang diinginkan, yakni pengawasan yang efektif terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan. Salah satu tujuan utama dari matriks kinerja ini adalah memastikan bahwa produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar aman, bermutu, dan memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya matriks kinerja ini, seluruh fungsi di Balai POM Payakumbuh diharapkan dapat menggunakannya sebagai panduan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil sepanjang periode 2025-2029 akan diarahkan untuk mencapai sasaran akhir tersebut, yaitu pengawasan yang efektif dan efisien. Hal ini bertujuan untuk mencegah peredaran produk berisiko serta menjamin kualitas dan keamanan produk yang beredar di masyarakat, demi melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 4.1 Matriks Kerangka Kinerja Balai POM di Payakumbuh 2025-2029

No	Sasaran Kinerja	No	Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	86	87	88	89
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91	92	93	94
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83,10	83,20	83,30	83,40	83,50
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,75	95,5	96,5	97	97,5
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi	91	92	93	94	95

No	Sasaran Kinerja	No	Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
			sesuai ketentuan					
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91	92	93	94	95
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%	100%	100%	100%	100%
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	15	17	19	22	25
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43
		16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81	82	83	84
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	17	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya efektivitas KIE	18	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,26	86,11	86,96	87,81	88,67
		19	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4	6	6	6	6
		20	Jumlah desa pangan aman	1	2	3	3	3
		21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	2	2
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	22	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	12,28%	29,82%	49,12%	73,68%	100,00%

No	Sasaran Kinerja	No	Indikator Kinerja	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja	23	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90	91	92	93	94
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	24	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
7	Layanan Publik UPT yang prima	25	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	26	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75	78	80	82	85
		27	Nilai AKIP UPT BPOM	75	75,5	76	77	77,5
		28	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		29	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,95	3	3,05	3,1	3,15

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan Balai POM di Payakumbuh dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Balai POM di Payakumbuh 2025-2029
berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	5.087	22.705	26.187	10.100	10.458
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3.318	3.488	3.658	3.840	4.128
TOTAL	8.405	26.193	29.845	13940	14.586

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Balai POM di Payakumbuh 2025-2029
berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (dalam Juta rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	8.405	26.193	29.845	13.940	14.586
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	-	-	-	-	-
TOTAL	8.405	26.193	29.845	13.940	14.586

Pada tahun 2025 dan 2026, Balai POM di Payakumbuh akan fokus pada beberapa kegiatan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan sediaan farmasi dan pangan olahan, serta mendukung pengembangan sektor ini di wilayah tersebut. Kegiatan pertama adalah meningkatkan efektivitas pengawasan bersama lintas sektor untuk memastikan masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Kedua, meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) guna menciptakan masyarakat yang cerdas dalam memilih produk yang aman dan berkualitas.

Selanjutnya, akan ada upaya untuk mendorong pertumbuhan dunia usaha, khususnya di sektor industri sediaan farmasi dan pangan olahan, dengan fokus pada UMKM. Ini akan dilakukan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan *regulatory assistance* yang bertujuan meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa. Poin keempat adalah meningkatkan perlindungan masyarakat dari kejahatan terkait

sediaan farmasi dan pangan olahan melalui fungsi deteksi dan penyidikan yang optimal.

Untuk mendukung kegiatan-kegiatan ini, pada rentang tahun 2025-2029 diproyeksikan adanya pekerjaan konstruksi pembangunan lanjutan gedung laboratorium dan sarana perkantoran. Pekerjaan ini direncanakan pelaksanaannya pada tahun 2026-2027 sehingga membutuhkan alokasi dana yang lebih besar dibandingkan tahun 2028-2029, karena pentingnya peningkatan kapasitas dan fasilitas guna mendukung fungsi pengawasan, pengujian, serta pelayanan publik yang lebih baik. Dengan pembangunan infrastruktur yang memadai, diharapkan Balai POM di Payakumbuh dapat memberikan layanan yang lebih profesional, adaptif, efektif, dan efisien, serta mewujudkan layanan publik yang prima untuk masyarakat.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Payakumbuh Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman perencanaan kinerja bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta RPJMN 2025–2029 dan Renstra Badan POM 2025–2029.

Renstra ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja Balai POM di Payakumbuh, guna memastikan produk yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, dokumen ini juga menjadi dasar dalam penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kinerja pegawai, serta sinergi lintas sektor dalam mendukung kesehatan masyarakat, perlindungan konsumen, serta daya saing produk nasional.

Sebagai bagian dari unit pelaksana teknis Badan POM di daerah, Balai POM di Payakumbuh berperan aktif dalam mendukung visi, arah kebijakan, dan sasaran strategis Badan POM melalui penyusunan dan pelaksanaan Renstra ini. Sejalan dengan hal tersebut, visi Balai POM di Payakumbuh mengacu pada visi Badan POM 2025–2029, yaitu *“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman, Bermutu, dan Berdaya Saing dalam Mendukung Masyarakat Sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.”*

Balai POM di Payakumbuh berperan dalam mendukung visi BPOM 2025–2029 melalui pelaksanaan misi yang mencakup peningkatan efektivitas pengawasan dan penindakan terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan, fasilitasi pengembangan dunia usaha termasuk UMKM, peningkatan kapasitas masyarakat melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima.

Rencana Strategis Balai POM di Payakumbuh Tahun 2025–2029 akan menjadi pedoman dalam pemantauan dan evaluasi kinerja bagi seluruh pegawai di lingkungan Balai POM di Payakumbuh. Melalui pelaksanaan yang konsisten, terukur, dan berkesinambungan, seluruh pegawai Balai POM di Payakumbuh diharapkan dapat

berperan aktif dalam mewujudkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis ini.

Kepala Balai Pengawas Obat
dan Makanan di Payakumbuh,

The image shows a circular official stamp of the Badan POM (Indonesian Food and Drug Administration) Di Payakumbuh. The stamp is purple and contains the text "BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN" around the top, "BADAN POM" in the center, and "DI PAYAKUMBUH" around the bottom. To the right of the stamp is a large, stylized handwritten signature in black ink.

Dio Ramondrana, S.Si., M.Sc

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI POM DI PAYAKUMBUH TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Payakumbuh								8,393,822,000	26,259,780,500	33,960,738,798	14,457,345,001	15,124,826,703	Balai POM di Payakumbuh	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								5,087,039,000	22,771,239,500	30,302,738,798	10,617,345,001	10,996,826,703	Balai POM di Payakumbuh	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		Balai POM di Payakumbuh										Balai POM di Payakumbuh	
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Payakumbuh	85	86	87	88	89						Balai POM di Payakumbuh
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Balai POM di Payakumbuh	26	27	28	29	30						Balai POM di Payakumbuh
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Payakumbuh	90	91	92	93	94						Balai POM di Payakumbuh

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Balai POM di Payakumbuh	100	100	100	100	100						Balai POM di Payakumbuh
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Payakumbuh	85	87	89	92	95						Balai POM di Payakumbuh
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Balai POM di Payakumbuh	83.1	83.2	83.3	83.4	83.5						Balai POM di Payakumbuh
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Payakumbuh	91	92	93	94	95						Balai POM di Payakumbuh
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Payakumbuh	91	92	93	94	95						Balai POM di Payakumbuh
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Payakumbuh	94.75	95,5	96.5	97	97.5						Balai POM di Payakumbuh

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Payakumbuh	91	92	93	94	95						Balai POM di Payakumbuh
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Balai POM di Payakumbuh	91	92	93	94	95						Balai POM di Payakumbuh
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Balai POM di Payakumbuh	91	92	93	94	95						Balai POM di Payakumbuh
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Balai POM di Payakumbuh	100	100	100	100	100						Balai POM di Payakumbuh
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Balai POM di Payakumbuh	15	17	19	22	25						Balai POM di Payakumbuh
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Balai POM di Payakumbuh	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43						Balai POM di Payakumbuh

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Payakumbuh	0	81	82	83	84						Balai POM di Payakumbuh
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		Balai POM di Payakumbuh	45	45	45	45	45	36,100,000	36,100,000	36,100,000	36,100,000	36,100,000	Balai POM di Payakumbuh
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai POM di Payakumbuh	110	116	122	128	134	40,329,000	42,528,764	75,228,000	78,927,738	82,627,475	Balai POM di Payakumbuh
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		Balai POM di Payakumbuh	235	247	259	272	286	139,406,000	146,524,604	218,393,000	229,354,811	241,159,838	Balai POM di Payakumbuh
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai POM di Payakumbuh	36	76	77	78	80	25,062,000	52,908,667	53,604,833	54,301,000	55,693,333	Balai POM di Payakumbuh
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai POM di Payakumbuh	287	417	420	425	430	297,087,000	431,656,024	434,761,463	439,937,195	445,112,927	Balai POM di Payakumbuh
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		Balai POM di Payakumbuh	0	0	0	0	0						Balai POM di Payakumbuh

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		Balai POM di Payakumbuh	1	1	1	1	1	72,195,000	108,292,500	162,438,750	243,658,125	365,487,188	Balai POM di Payakumbuh
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Balai POM di Payakumbuh	1	1	1	1	1	142,517,000	172,517,000	258,775,000	388,165,000	582,247,000	Balai POM di Payakumbuh
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Balai POM di Payakumbuh	1	1	1	1	1	2,657,518,000	2,657,518,000	6,470,777,000	6,470,777,000	6,470,777,000	Balai POM di Payakumbuh
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		Balai POM di Payakumbuh	0	0	0	0	0						Balai POM di Payakumbuh
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi		Balai POM di Payakumbuh	0	0	0	0	0						Balai POM di Payakumbuh
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Payakumbuh	100	100	100	100	100						Balai POM di Payakumbuh
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		Balai POM di Payakumbuh	1	2	3	4	5	1,809,000	3,618,000	5,427,000	7,236,000	9,045,000	Balai POM di Payakumbuh

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya efektivitas KIE		Balai POM di Payakumbuh	0	0	0	0	0						Balai POM di Payakumbuh
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Balai POM di Payakumbuh	85.26	86.11	86.96	87.81	88.67						Balai POM di Payakumbuh
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Balai POM di Payakumbuh	4	6	6	6	6						Balai POM di Payakumbuh
	3	Jumlah desa pangan aman	Balai POM di Payakumbuh	1	2	3	3	3						Balai POM di Payakumbuh
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Balai POM di Payakumbuh	1	1	1	2	2						Balai POM di Payakumbuh
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		Balai POM di Payakumbuh	189	388	400	410	420	94,500,000	194,000,000	200,000,000	205,000,000	210,000,000	Balai POM di Payakumbuh
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		Balai POM di Payakumbuh	44	52	53	54	55	57,585,000	68,055,000	69,363,750	70,672,500	71,981,250	Balai POM di Payakumbuh

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		Balai POM di Payakumbuh	4	6	6	6	6	172,388,000	258,582,000	258,582,000	258,582,000	258,582,000	Balai POM di Payakumbuh
	RO 4: Desa Pangan Aman		Balai POM di Payakumbuh	1	2	3	3	3	127,652,000	255,304,000	382,956,000	382,956,000	382,956,000	Balai POM di Payakumbuh
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		Balai POM di Payakumbuh	1	1	1	2	2	80,739,000	80,739,000	80,739,000	161,478,000	161,478,000	Balai POM di Payakumbuh
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu		Balai POM di Payakumbuh	0	0	0	0	0						Balai POM di Payakumbuh
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Balai POM di Payakumbuh	12.28%	29.82%	49.12%	73.68%	100.00%						Balai POM di Payakumbuh
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		Balai POM di Payakumbuh	7	11	12	13	14	38,925,000	61,167,857	66,728,571	72,289,286	77,850,000	Balai POM di Payakumbuh

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Balai POM di Payakumbuh	0	0	0	0	0						Balai POM di Payakumbuh
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Balai POM di Payakumbuh	90	91	92	93	94						Balai POM di Payakumbuh
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		Balai POM di Payakumbuh	2	3	3	4	4	211,864,000	317,796,000	317,796,000	423,728,000	423,728,000	Balai POM di Payakumbuh
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		Balai POM di Payakumbuh	0	0	0	0	0						Balai POM di Payakumbuh
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Balai POM di Payakumbuh	90	91	92	93	94						Balai POM di Payakumbuh
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		Balai POM di Payakumbuh	14	14	14	14	14	62,383,000	62,383,000	62,383,000	62,383,000	62,383,000	Balai POM di Payakumbuh

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Publik UPT yang prima		Balai POM di Payakumbuh	0	0	0	0	0						Balai POM di Payakumbuh
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Balai POM di Payakumbuh	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6						Balai POM di Payakumbuh
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		Balai POM di Payakumbuh	26	25	26	27	28	73,303,000	70,483,654	73,303,000	76,122,346	78,941,692	Balai POM di Payakumbuh
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal		Balai POM di Payakumbuh	0	0	0	0	0						Balai POM di Payakumbuh
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Balai POM di Payakumbuh	75	78	80	82	85						Balai POM di Payakumbuh
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	Balai POM di Payakumbuh	75	75.5	76	77	77.5						Balai POM di Payakumbuh
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Balai POM di Payakumbuh	5	5	5	5	5						Balai POM di Payakumbuh
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Balai POM di Payakumbuh	2.95	3	3.05	3.1	3.15						Balai POM di Payakumbuh

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
								(Dalam Juta Rupiah)					
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	Balai POM di Payakumbuh	1	1	1	1	1	287,000,000	287,000,000	287,000,000	287,000,000	287,000,000	Balai POM di Payakumbuh
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Balai POM di Payakumbuh	1	1	1	1	1	418,677,000	17,276,565,430	20,575,882,430	418,677,000	418,677,000	Balai POM di Payakumbuh
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi	Balai POM di Payakumbuh	4	15	17	20	22	50,000,000	187,500,000	212,500,000	250,000,000	275,000,000	Balai POM di Payakumbuh
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM		Balai POM di Payakumbuh						3,306,783,000	3,488,541,000	3,658,000,000	3,840,000,000	4,128,000,000	Balai POM di Payakumbuh
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Balai POM di Payakumbuh	1	1	1	1	1	8,000,000	8,000,000	8,000,000	20,000,000	30,000,000	Balai POM di Payakumbuh
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Balai POM di Payakumbuh	1	1	1	1	1	3,298,783,000	3,480,541,000	3,650,000,000	3,820,000,000	4,098,000,000	Balai POM di Payakumbuh